

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP - TAHUN 2018



PERWAKILAN
BKKBN
DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Substansi yang ada dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2018 dan menyajikan informasi capaian kinerja, proses pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis capaian kinerja.

Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, Januari 2019

Kepala,



Drs. Bambang Marsudi, MM



Ikhtisar Eksekutif

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berisi sasaran strategis dan sasaran program dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019.

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu **“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”**, dengan misi :

- Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
- Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- Memfasilitasi pembangunan keluarga.
- Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
- Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 5 sasaran strategis, yaitu :

- Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)
- Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
- Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
- Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini terdapat 21 (dua puluh satu) indikator yang terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran, yaitu Sasaran Strategis Sasaran Program dan Sasaran Strategis di Luar Renstra. Sasaran strategis terdiri dari 6 (enam) indikator yang 5 (lima) diantaranya merupakan IKU BKKBN yang meliputi : Angka Kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun); Persentase prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence/mCPR*); Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi; Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*); Persentase peserta KB Aktif MKJP; dan Jumlah peserta KB Aktif tambahan. Sedangkan Sasaran Program terdiri dari 6 (enam) indikator dan Sasaran Strategis di Luar Renstra terdiri dari 9 (sembilan) indikator.

Dari 6 (enam) indikator pada Sasaran Strategis 5 (lima) diantaranya mampu dicapai dengan capaian diatas 86%, namun pada indikator Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan indeks capaian masih kurang, yaitu hanya sebesar 43,11%. Sedangkan pada Sasaran Program sebanyak 4 (empat) indikator dapat dicapai dengan indeks Baik Sekali (persentase capaian diatas 100%) sedangkan untuk 2 (dua) indikator lainnya indeks capaian berada pada kategori kurang, bahkan masih ada yang sangat kurang dengan capaian minus, yaitu pada indikator Persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada PUS. Untuk sasaran strategis di luar renstra persentase capaian berada di kisaran 81% s.d. 400%. Adapun capaian Perjanjian Kinerja secara lengkap sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	CAPAIN 2018	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
A	SASARAN STRATEGIS						
1	Menurunnya angka kelahiran total (<i>TFR</i>)	1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS	2,05	2,24	90,73%	SKAP 2018
2	Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (<i>mCPR</i>)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	54,16	53,9	99,52%	SKAP 2018

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	CAPAIN 2018	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
A SASARAN STRATEGIS							
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,00	28,4	86,40%	SDKI 2017
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>need</i>)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	7,70	6,3	118,18%	SDKI 2017
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	41,77	47,20	112,99%	SKAP 2018
6	Meningkatnya peserta KB Aktif	6	Jumlah peserta KB Aktif tambahan	9.119	3.931	43,11%	SKAP 2018
B SASARAN PROGRAM							
7	Menurunnya angka kelahiran pada remaja (<i>ASFR</i> 15-19 tahun)	7	Angka kelahiran pada remaja (<i>ASFR</i> 15-19 tahun)	16	15	106,25%	SDKI 2017
8	Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	8	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	8,10	20,4	-51,88%	SDKI 2017
9	Meningkatnya median usia kawin pertama	9	Median usia kawin pertama w	23,5	23,8	101,44%	SDKI 2017
10	Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang kependudukan	10	Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan	52,60	56,8	107,98%	SKAP 2018
11	Meningkatnya pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi	11	Persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	51,90	34,4	66,28%	SKAP 2018
12	Meningkatnya pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	12	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	20,00	23,75	118,75%	BIDANG DALDUK
C INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA							
13	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	13	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	66,9	64,44	96,29%	SKAP 2018
14	Terbentuknya Kampung KB	14	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	73	76	104,11%	ADPIN
15	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	15	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	25,00	100,00	400,00%	ADPIN
16	Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak	16	Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan	13,31	13,41	100,76%	DALLAP 2018
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	17	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 (Skor: 2,7)	3,45	172,50%	Laporan PM Tingkat Maturitas Penyeleng. SPIP

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	CAPAIN 2018	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
C INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA							
18	Meningkatnya pencapaian kinerja	18	Persentase capaian kinerja	≥ 90	82,45	91,61%	SMART
19	Meningkatnya pencapaian output	19	Persentase pencapaian output	≥ 95	80,87	85,13%	SMART
20	Meningkatnya penyerapan anggaran	20	Persentase penyerapan anggaran	≥ 95	76,95	81,00%	SMART
21	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	21	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00	99,54	99,54%	SK PSP BMN Tahun 2018

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya relatif tidak selaras. Hal tersebut dikarenakan dari 21 (dua puluh satu) indikator Perjanjian Kinerja hanya 5 (lima) indikator yang selalu diukur dari tahun 2016. Trend capaian tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2016			2017			2018		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
A SASARAN STRATEGIS										
1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	7,20	11,5	40,28%	7,03	6,3	110,38%	7,70	6,3	118,18%
2	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	31,70	39,36	124,15%	39,05	40,97	104,91%	41,77	47,20	112,99%
B SASARAN PROGRAM										
3	Angka kelahiran pada remaja (<i>ASFR</i> 15-19 tahun)	29	32	89,66%	28	15	146,43%	16	15	106,25%
4	Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan	48,00	54,2	112,92%	62,50	55,1	88,16%	52,60	56,8	107,98%
5	Persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	22,60	23,2	102,65%	43,70	30,6	70,11%	51,90	34,4	66,28%

Dari kelima indikator tersebut dapat dilihat bahwa seluruh indikator mengalami trend kenaikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja Perwakilan BKKBN DIY baik dalam menurunkan *unmet need* dan *ASFR* 15-19 tahun maupun dalam menaikkan Persentase KB Aktif MKJP, Persentase Pengetahuan Keluarga Tentang Isu Kependudukan dan Persentase

Pengetahuan PUS tentang Alat/Cara Kontrasepsi (semua alat/cara KB Modern).

Anggaran yang diterima oleh Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2018 telah berhasil terserap sebesar 76,95%. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 86.933.790.000,-, jumlah yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp. 66.896.318.297,-.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Program KKBPK di DIY terutama dalam hal menurunkan persentase kehamilan tidak diinginkan dari PUS dan meningkatnya jumlah peserta KB aktif tambahan maka langkah yang perlu dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Meningkatkan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dalam tahun 2019 dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian PA rendah dan *urban* *nd* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB dengan memanfaatkan analisis devinfo yang sudah dilakukan per kecamatan;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepaluan Terluar (DTPK) melalui Bhakti Sosial pelayanan KB MKJP yang terintegrasi dengan pelayanan papsmear.
5. Mengintensifkan pembinaan Kampung KB dan mendorong Seluruh Kabupaten/Kota untuk membentuk Kampung KB percontohan
6. Mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarluaskan informasi program KKBPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Aspek Strategis.....	3
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	9
Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja.....	10
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	15
C. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis.....	17
Bab III Akuntabilitas kinerja.....	19
A. Capaian Kinerja.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	50
C. Kinerja Dan Capaian Lainnya.....	51
Bab IV Penutup.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Langkah-Langkah ke Depan.....	64
LAMPIRAN.....	66

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2018.....	8
Tabel 1.2 Aset Tetap per 31 Desember 2017	8
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	12
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY.....	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2018.....	16
Tabel 3.1 Kategorisasi Indeks Capaian	19
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	20
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018	22
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018	23
Tabel 3.5 Perbandingan Tahun 2018 dengan Dua Tahun Sebelumnya	28
Tabel 3.6 Perbandingan Tahun 2018 dengan Jangka Menengah 2019	30
Tabel 3.7 Rincian Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)	50



Daftar Gambar

Gambar 1.1. Grafik Komposisi SDM Menurut Jenis Kelamin.....	6
Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Menurut Jabatan.....	6
Gambar 1.3. Grafik Komposisi SDM Menurut Golongan	7
Gambar 1.4. Grafik Komposisi SDM Menurut Pendidikan.....	7
Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Unmet Need	39
Gambar 3.2. Grafik Perkembangan Persentase PA MKJP	39
Gambar 3.3. Grafik Perkembangan ASFR 15-19 Tahun.....	40
Gambar 3.4. Grafik Perkembangan Pengetahuan Isu Kependudukan	41
Gambar 3.5. Grafik Perkembangan Pengetahuan Alat KB Modern	42



Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendukung pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Di dalam Strategi Pembangunan Nasional (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka BKKBN berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

B. Misi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi, kedudukan, tugas, dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Tugas

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi,

penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

C. Aspek Strategis

1. Isu Strategis

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah :

- a. Angka Fertilitas total (TFR) di DIY berdasarkan beberapa hasil survei menunjukkan tren kenaikan dan saat ini berada di angka 2,2 anak per wanita (laporan SDKI 2017) meskipun angka tersebut lebih rendah dari angka nasional dan mendekati ideal (2,1 anak per wanita).
- b. Kesertaan ber KB
 - 1) Kesertaan ber KB *all method* meningkat menjadi 76%, namun KB modern mengalami penurunan (57,3%), hal ini karena adanya peningkatan metode KB tradisional dari 10,3% menjadi 18,6% (laporan SDKI 2017)

- 2) Angka Putus Pakai masih tinggi yaitu sebesar 28,4% (laporan SDKI 2017)
 - 3) Capaian peserta KB baru (PB) tidak berdampak terhadap penambahan Peserta KB aktif (PA) modern.
 - 4) Prevalensi KB MKJP mengalami penurunan sebesar 2,5% dan saat ini menjadi 18,6%, terutama penurunan pemakaian KB IUD/AKDR/Spiral (laporan SDKI 2017)
- c. Masih rendahnya indeks pengetahuan remaja tentang masa subur yaitu 64,4% (Laporan SKAP 2018).
- d. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- 1) Pesan Kunci Advokasi dan KIE perlu penajaman, terdapat Kesenjangan Mendapatkan Informasi
 - 2) Peran mitra kerja dalam operasional program KKBPK perlu ditingkatkan
 - 3) Dukungan tenaga penggerak lini lapangan perlu ditingkatkan
- ▣ Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Keluarga perlu dioptimalkan

2. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN DIY dalam Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Program KKBPK selama tahun 2018 adalah :

- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem jaminan kesehatan nasional
- b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

- c. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi
- d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia
- e. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- f. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di daerah
- g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai
- h. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKBPK

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1. Struktur Organisasi

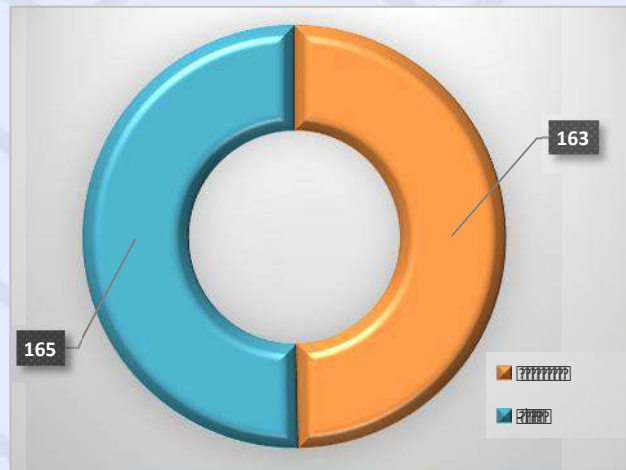
Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi, adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A yang berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- e. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
- f. Bidang Pelatihan dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

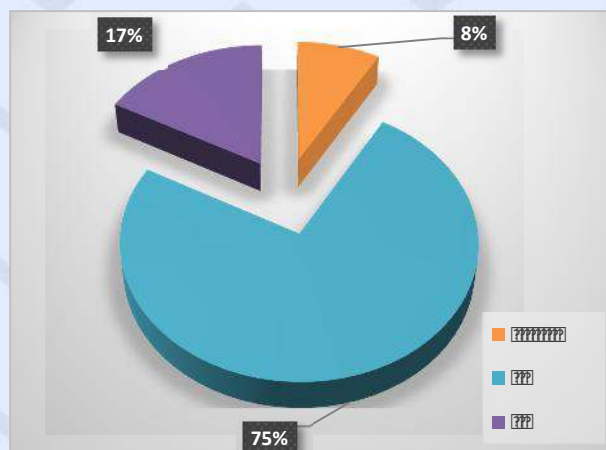
2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia per 31 Desember 2018 sebanyak 328 orang. Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2017 sebanyak 104 orang, jumlah pegawai per 31 Desember 2018 bertambah sebanyak 224 orang dikarenakan adanya pengalihan pegawai dengan jabatan Penyuluh KB dari PNS Daerah Kabupaten/Kota menjadi PNS Pusat.

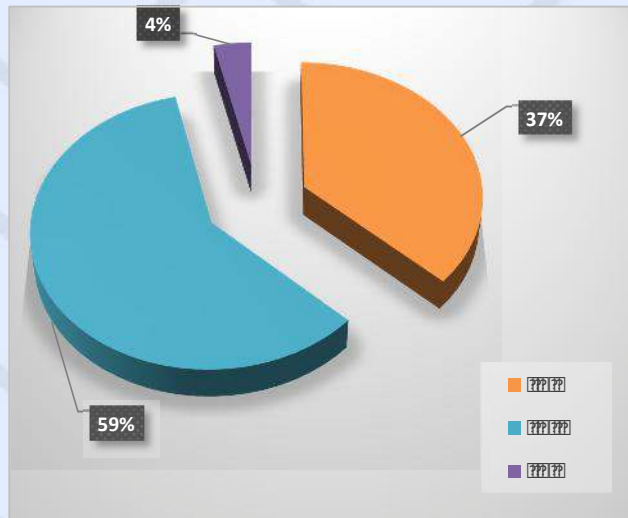
Komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di Perwakilan BKKBN DIY dapat digambarkan pada grafik berikut :



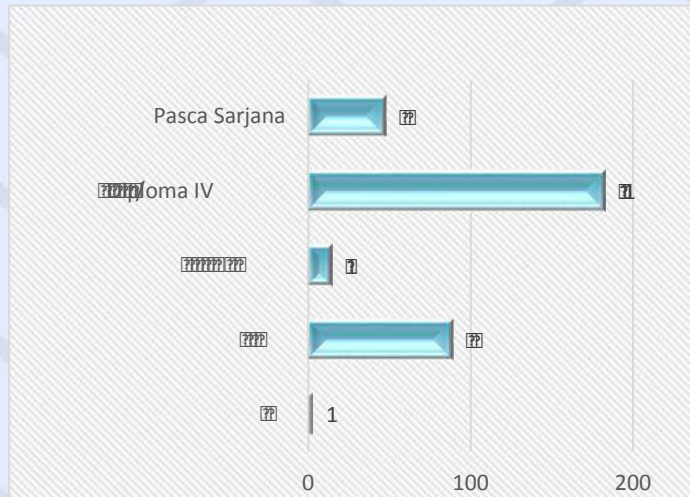
Gambar 1.1. Grafik Komposisi SDM Menurut Jenis Kelamin



Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Menurut Jabatan



Gambar 1.3. Grafik Komposisi SDM Menurut Golongan



Gambar 1.4. Grafik Komposisi SDM Menurut Pendidikan

3. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2018 dibiayai dari DIPA Tahun 2018. Pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 86.933.790.000,- dengan realisasi mencapai Rp 66.896.318.297,- atau 76,95%. Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
 Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
DIPA	Rp. 86.933.790.000,-	Rp. 66.896.318.297,-	76,95

Sumber data : Aplikasi e-monev SMART

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.2
 Aset Tetap per 31 Desember 2017

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2018	% Naik/ (Turun)
1	Tanah	78.147.597.000	80.412.488.000	2,89
2	Peralatan dan Mesin	7.560.647.326	7.376.949.274	(2,43)
3	Gedung dan Bangunan	12.523.229.000	12.420.340.625	(0,82)
4	Aset tetap lainnya	35.759.300	35.759.300	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	404.185.200	404.185.200	0
6	Akumulasi Penyusutan	(6.661.453.900)	(7.057.143.827)	5,94
	Jumlah	92.009.963.926	93.592.578.572	1,72

Sumber data : SIMAK BMN

Sarana dan prasarana pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,72% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat koreksi terhadap hasil revaluasi BMN Tahun 2017 oleh Kementerian Keuangan RI.

E. Sistematika Penngjian

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2018 dengan berbagai keberhasilan maupun hambatannya, terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang latar belakang penyusunan LKIP, kedudukan, tugas dan fungsi, aspek strategis, serta struktur organisasi dan sumber daya.

Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

Memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 dan perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 2018 beserta realisasi anggaran serta perbandingan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2016 dan 2017.

Bab IV Penutup

Menguraikan rangkuman capaian sasaran program dan rencana tindak lanjut atau langkah strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun 2019.

Lampiran

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan ini



Bab II

Rencana dan Perjanjian Kinerja

Sebagai salah satu unit kerja BKKBN yang berada di daerah, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh BKKBN. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat.

A. Renstra 2015 – 2019

Penyusunan Rencana Strategis BKKBN merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra K/L merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah.

Gambaran singkat Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi BKKBN

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Untuk itu, BKKBN

berkomitmen turut mensukseskan prioritas pembangunan nasional di dalam RPJPN dan agenda prioritas nomor 5 di dalam Nawa Cita melalui:

Visi :

Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Misi :

- a. Mengarus-utamakan pembangunan berbasis kependudukan.
 - b. Mengembangkan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 - c. Memfasilitasi pembangunan keluarga.
 - d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
 - e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
2. Tujuan Perwakilan BKKBN DIY

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi diatas maka dirumuskan Tujuan Perwakilan BKKBN DIY sebagai berikut :

- a. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
- b. Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien) dan meningkatkan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi.
- c. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penjang

kehidupan dalam berkeluarga melalui pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu antar sector dan Kab/Kota.

3. Sasaran Startegis BKKBN

Untuk mencapai tujuan utama di atas Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)
- b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ($\frac{U}{M}$)
- d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015 – 2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator	Baseline Target 2014	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka kelahiran total ($\frac{U}{M}$) per WUS (15-49 tahun)	2,10 (SDKI 2012)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern ($\frac{C}{M}$)	59,60 (SDKI 2012)	62,28	62,48	62,69	62,89	63,10
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ($\frac{U}{M}$)	11,50 (SDKI 2012)	10,69	10,57	10,35	10,23	10,00
4	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	36,21 (SR 2014)	40,56	41,93	42,94	44,12	46,50
5	Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi	27,00 (SDKI 2012)	25,90	25,61	25,21	24,91	24,51

Sumber Data : Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2015-2019

4. Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015-2019, Perwakilan BKKBN DIY mempunyai Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) Program Kegiatan, yaitu Program KKBPK Provinsi, Program Dukungan Manajemen (DKM) Provinsi, Program Akuntabilitas pengelolaan (pengawasan) Provinsi dan Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan Provinsi. Berikut Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY :

Tabel 2.2

Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
18	Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi	Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah	Program KKBPK Proinsi
			Bidang Dalduk Proinsi
			I.18 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
			18.1 Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)
			18.2 Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berbasis kependudukan
			18.3 Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Proinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)
			18.4 Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk
			Bidang KB-KR Proinsi
			II.18 Cakupan Pembinaan Kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan Wilayah
			18.5 Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP
			18.6 Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), Wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus
			18.7 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan Wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
			18.8 Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Proinsi dan

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	
18	Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Proinsi	Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan Daerah	18.9	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan KBKR di Kabupaten dan Kota
			Bidang KS-PK Proinsi	
			III.18	Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan Daerah
			18.10	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan Daerah
			18.11	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integratif
			18.12	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)
			18.13	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL
			18.14	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS
			18.15	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK
			Bidang ADPIN Proinsi	
			IV.18	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan Daerah yang mendapat Pembinaan Adokasi dan KIE program KKBPK
			18.16	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi adokasi dan KIE pembangunan KKBPK
			18.17	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional
			V.18	Persentase petugas lini lapangan (PKB/PLKB) yang mendapat Dukungan Operasional Program KKBPK
			18.18	Jumlah pengerakan pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan
			18.19	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat
			VI.18	Jumlah Daerah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembanguann KKB di seluruh tingkatan Daerah
			18.20	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK
			VII.18	Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Proinsi
			18.21	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di proinsi
			24	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Proinsi
Sekretariat Proinsi				
I.24	Dukungan Manajemen di Proinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)			
24.1	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Proinsi)			
24.2	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran			
24.3	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Proinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)			

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
28	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	Program Akuntabilitas pengelolaan (pengawasan) Proinsi
			Pengawasan Proinsi
			I.28 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di proinsi
			28.1 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK
33	Pelaksanaan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan Proinsi
			Latbang Proinsi
			I.33 Jumlah SDM proinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyeluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas
			33.1 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)
			II.34 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Proinsi yang dimanfaatkan
			33.2 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan

Sumber data : Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2015 – 2019

B. PKJ 201

8

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja akan digunakan pimpinan BKKBN untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 memuat sasaran strategis, sasaran program dan indikator strategis di luar renstra. Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 memuat 6 (enam) indikator sasaran strategis, 6 (enam) indikator sasaran program dan 9 (sembilan) indikator di luar renstra yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2018

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN
A SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (<i>TFR</i>)	1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,05
2	Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (<i>mCPR</i>)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	54,16
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,00
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	7,70
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	41,77
6	Meningkatnya peserta KB Aktif	6	Jumlah peserta KB Aktif tambahan	9.119
B SASARAN PROGRAM				
7	Menurunnya angka kelahiran pada remaja (<i>ASFR</i> 15-19 tahun)	7	Angka kelahiran pada remaja (<i>ASFR</i> 15-19 tahun)	16
8	Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	8	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	8,10
9	Meningkatnya median usia kawin pertama	9	Median usia kawin pertama wanita	23,5
10	Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang kependudukan	10	Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan	52,60
11	Meningkatnya pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi	11	Persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	51,90
12	Meningkatnya pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	12	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	20,00
C INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
13	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	13	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	66,9
14	Terbentuknya Kampung KB	14	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	73
15	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	15	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	25,00
16	Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak	16	Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan	13,31
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	17	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 (Skor: 2,7)
18	Meningkatnya pencapaian kinerja	18	Persentase capaian kinerja	90
19	Meningkatnya pencapaian output	19	Persentase pencapaian output	95
20	Meningkatnya penyerapan anggaran	20	Persentase penyerapan anggaran	95
21	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	21	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00

Sumber data : Perjanjian Kinerja Tahun 2018

C. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK sebelum melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin, Perwakilan BKKBN DIY telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja (RAPK) sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN DIY antara lain melalui :

1. RADALGRAM (Rapat Pengendalian Program)

Forum RADALGRAM dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY, perwakilan dari OPD KB Kab/Kota dan juga perwakilan dari PKB/PLKB. Dalam rapat tersebut dilaporkan hasil pelaksanaan kinerja, baik tentang capaian program maupun keuangan, setiap bulan sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku.

Sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan dalam melaporkan capaian program adalah Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (Dalap) serta Pelaporan Kontrasepsi (Pelkon). Sedangkan untuk laporan keuangan menggunakan data dari F/II/Keu dan F/V/KB untuk persediaan alat kontrasepsi.

Melalui forum ini diketahui perkembangan capaian kinerja masing-masing kabupaten/kota sehingga dapat diketahui hambatan yang dialami di setiap Daerah untuk kemudian dapat menentukan upaya atau langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2. RAKORDA (Rapat Koordinas Daerah)

Rapat Koordinasi Daerah diadakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan program secara tahunan. Rapat ini melibatkan seluruh mitra kerja/stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya forum ini dapat mewujudkan penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terutama dalam penentuan sasaran program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah.

Selain itu juga dapat menjalin sinergitas komitmen, dukungan dan kerjasama antara BKKBN, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah sehingga manfaat program KKBPK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh tingkatan wilayah.

3. Review / Telaah Program KKBPK

Review / Telaah merupakan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan setiap semester. Forum ini melibatkan seluruh mitra kerja Perwakilan BKKBN DIY baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pertemuan ini diketahui perkembangan capaian kinerja sampai dengan semester I dan juga faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat kinerja tersebut. Dalam forum ini selain evaluasi capaian Program juga untuk menggalang komitmen dari pelaksana Program KKBPK dan mitra kerja berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja/capaian Program sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi / pencapaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Pada bab ini akan dibahas hambatan atau kendala dan upaya yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja 2018.

Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian. Penghitungan indeks capaian perlu memperhitungkan kategorisasi capaian. Ketentuan penetapan kategorisasi indeks capaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kategorisasi Indeks Capaian

No	Interval Capaian	Kategori Capaian	Kode Capaian
1	> 100%	Baik Sekali	BIRU
2	100% ≤ 87,5%	Baik	HIJAU
3	87,5% ≤ 75%	Cukup	KUNING
4	< 75 %	Kurang	MERAH

1) Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 3 (tiga) jenis sasaran, yaitu Sasaran Strategis dengan 6 (enam) indikator, Sasaran Program dengan 6 (enam) indikator dan Sasaran diluar Renstra dengan 9 (sembilan) indikator. Cara pengukuran kinerja tahun 2018 ini

berdasarkan pada Definisi Operasional Perjanjian Kinerja Provinsi Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat (terlampir). Adapun hasil pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sebagai berikut

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	INDIKATOR	NO	INDIKATOR	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	PERSENTASE CAPAIAN	REFERENSI DATA
A. REPRODUKSI							
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertilityrate/TFR) perWUS	2,05	2,24	90,73%	SKAP 2018
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (MCPMR)	2	Prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/MCPMR)	54,16	53,9	99,52%	SKAP 2018
3	Menurunnya tingkat pemakaian kontrasepsi	3	Prevalensi penurunan angka ketidakbelanggaan pemakaian (tingkat pemakaian) kontrasepsi	25,00	28,4	86,40%	SDKI 2017
4	Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Prevalensi kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	7,70	6,3	118,18%	SDKI 2017
5	Meningkatnya persentase KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5	Prevalensi Persentase KB Aktif MKJP	41,77	47,20	112,99%	SKAP 2018
6	Meningkatnya persentase KB Aktif	6	Jumlah persentase KB Aktif tambahan	9.119	3.931	43,11%	SKAP 2018
B. REPRODUKSI							
7	Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	7	Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	16	15	106,25%	SDKI 2017
8	Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	8	Prevalensi kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	8,10	20,4	-51,88%	SDKI 2017
9	Meningkatnya median usia kawin pertama	9	Median usia kawin pertama wanita	23,5	23,8	101,44%	SDKI 2017
10	Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang isipendudukan	10	Prevalensi pengetahuan keluarga tentang isipendudukan	52,60	56,8	107,98%	SKAP 2018
11	Meningkatnya pengetahuan PUS tentang alat-alat kontrasepsi	11	Prevalensi pengetahuan PUS tentang alat-alat kontrasepsi (semua alat-alat KB modern)	51,90	34,4	66,28%	SKAP 2018
12	Meningkatnya pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	12	Prevalensi Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	20,00	23,75	118,75%	BIDANG DALDUK

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	REKOR 2018	CAPAIAN 2018	PERSEN CAPAIAN	BERDASAR
C INDIKATOR REGISTRASI UAHB							
13	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	13	Indeks Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	66,9	64,44	96,29%	SKAP 2018
14	Terbentuknya Kampung KB	14	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	73	76	104,11%	ADPIN
15	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	15	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	25,00	100,00	400,00%	ADPIN
16	Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak	16	Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki badan terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan	13,31	13,41	100,76%	DALLAP 2018
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	17	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 (Skor: 2,7)	3,45	172,50%	Laporan PM Matriks Penyeleng. SPIP
18	Meningkatnya pencapaian kinerja	18	Persentase capaian kinerja	90	82,45	91,61%	SMART
19	Meningkatnya pencapaian optimal	19	Persentase pencapaian optimal	95	80,87	85,13%	SMART
20	Meningkatnya penyerapan anggaran	20	Persentase penyerapan anggaran	95	76,95	81,00%	SMART
21	Terlaksananya penerapan BMN berdasarkan status penggunaannya	21	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00	99,54	99,54%	SK PSP Tahun 2018

Dari 6 (enam) indikator pada Sasaran Strategis 5 (lima) diantaranya yang dapat dicapai dengan capaian diatas 86%, namun pada indikator Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan indeks capaian masih kurang, yaitu hanya sebesar 43,11%. Sedangkan pada Sasaran Program sebanyak 4 (empat) indikator dapat dicapai dengan indeks Baik Sekali (persentase capaian diatas 100%) sedangkan ada 2 (dua) indikator lainnya indeks capaian berada pada kategori kurang, bahkan masih ada yang sangat kurang dengan capaian minimal, yaitu pada indikator Persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada PUS. Untuk sasaran strategis di lar rensta persentase capaian berada di kisaran 81% s.d. 400%.

Hasil pengukuran capaian kinerja Perwakilan BKKBN DIY jika dibandingkan dari capaian target tahun 2018 yang terdapat dalam Renstra 2015 – 2019 Perwakilan BKKBN DIY, sebagai berikut

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018

No	INDIKATOR	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	PERSEN CAPAIAN	SERDAK
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) perWUS (15-49 tahun)	2,10	2,24	93,33%	SKAP 2018
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	62,89	53,9	85,70%	SKAP 2018
3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,23	6,3	138,41%	SDKI 2017
4	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	44,12	47,70	108,11%	SKAP 2018
5	Persentase tngkat pemakaian kontrasepsi	24,91	28,4	85,98%	SDKI 2017

Dari 5 (lima) indikator yang ada, terdapat 2 (dua) indikator yang memiliki indeks capaian baik sekali (persentase capaian diatas 100%). Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lainnya kisaran persentase capaian hampir mendekati 100% yaitu 85% sd. 93%.

Selain Indikator Kinerja Sasaran, dalam Rencana juga terdapat Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator tersebut terdiri dari 4 (empat) Program Kegiatan, yaitu Program KKBPK Provinsi, Program Dukungan Manajemen (DKM) Provinsi, Program Akutabilitas pengelolaan (pengawasan) Provinsi dan Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan Provinsi. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 tertera pada tabel berikut

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	PERSENTASE CAPAIAN
18	Program KBPK Poinisi			
	Bidang Daldudk Poinisi			
I.18	Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam angka pengendalian kuantitas penduduk	1 Pov(85% kab/koa)	1 Pov(85% kab/koa)	100,00%
	18.1 Peentae Kab/Koa yng mengimplementasikan kebijakan dan begi pengendalian penduduk (Grand Design, Pofil/Paameerdan Pokks Penduduk)	85 %	85 %	100,00%
	18.2 Peentae Kabupaten/Koa yng memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sbagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawaan kependudukan	20 %	20 %	100,00%
	18.3 Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Poinisi dan Kabupaten/Koa (fomal, non fomal, infomal)	6 Wilayah	6 Wilayah	100,00%
	18.4 Jumlah Bimbingan Teknis Monibing dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	5 Kab/Koa	5 Kab/Koa	100,00%
	Bidang KB-KR Poinisi			
II.18	Cakupan Pembinaan Keethan berKB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yng sbai dengan ndaais pelayanan KB di eluh tngkaan wilayah	1 pov(100% dar jumlah kab/koa)	1 pov(100% dar jumlah kab/koa)	100,00%
	18.5 Jumlah penggeakan pelayanan KB MKJP	9.119 Additional User	3.931 Additional User	43,11%
	18.6 Jumlah penggeakan pelayanan KB dan KR di Daeah Tetnggal, Pebataan dan Kepulauan luar(DTPK), wilayah mikin pekoan dan saan khusus	3 frek/kab/h	3 frek/kab/h	100,00%
	18.7 Peentae Fakes dan jejainnya (di eluh tngkaan wilayah) yng bekejasama dengan BPJS dan membeikan pelayanan KBKR sbai dengan ndaais pelayanan	71,1 %	82 %	115,33%
	18.8 Peentae Fakes yng melakukan promois dan konseling Keethan dan hak-hak Repoduk di Poinisi dan Kab/Koa	66 %	100 %	151,52%
	18.9 Jumlah Pembinaan, Monibing, evaluasi dan Fabis kegiatan KBKR di Kabupaten dan Koa	5 Kab/Koa	5 Kab/Koa	100,00%
*)	Pemenuhan Keediaan Alokasi di Fakes	328 Fakes	328 Fakes	100,00%
*)	18.33 Jumlah keediaan Alokasi	328 Fakes	328 Fakes	100,00%
	Bidang KS-PK Poinisi			
III.18	Pembinaan Pembangunan keluarga di eluh tngkaan wilayah	1 pov 5 kab/koa	1 pov 5 kab/koa	100,00%
	18.10 Jumlah pelaksanaan sbais dan dieminasi kebijakan Keluarga Sejahtea dan Pembedayan Keluarga (Pembangunan Keluarga) di eluh tngkaan wilayah	1 pov 5 kab/koa	1 pov 5 kab/koa	100,00%
	18.11 Peentae Kabupaten/Koa yng mengembangkan kegiatan BKB Holistik Integrate	100 %	100 %	100,00%
	18.12 Peentae Kabupaten/Koa yng melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100 %	100 %	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET 2018	CAPAIAN 2018	PERSENTASE CAPAIAN
18	18.13	Peentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100 %	100 %	100,00%
	18.14	Peentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100 %	100 %	100,00%
	18.15	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KSPK	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100,00%
	*)	Keluarga yang Memiliki Balita Teparar 1000 HPK	10.762 Keluarga	9.610 Keluarga	89,30%
	*)	18.23 Pomo dan KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan	10.762 Keluarga	9.610 Keluarga	89,30%
	*)	Peningkatan Pomo dan Penguatan Keluarga yang memiliki Lansia dan Lansia melalui BKL	32.800 Keluarga	25.268 Keluarga	77,04%
	*)	18.24 Jumlah keluarga yang memiliki lansia yang ikt BKL	32.800 Keluarga	25.268 Keluarga	77,04%
Bidang ADPIN Poinisi					
IV.18	Peentase Stakeholder mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Adokasi dan KIE program KKBPK		70 %	100 %	142,86%
	18.16	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi adokasi dan KIE pembangunan KKBPK	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100,00%
	18.17	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	4 Media	4 Media	100,00%
V.18	Peentase petgas/instansi lapangan (PKB/PLKB) yang mendapat Dukungan Operasional Program KKBPK		100 %	100 %	100,00%
	18.18	Jumlah penggeakan pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah	5 Geak	5 Geak	100,00%
	18.19	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100,00%
VI.18	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemuban dalam pembanguann KKB di seluruh tingkatan wilayah		1 Poy 5 Kab/Kota	1 Poy 5 Kab/Kota	100,00%
	18.20	Peentase kesaban stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100 %	100 %	100,00%
VII.18	Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Poinisi		2 Jenis data	2 Jenis data	100,00%
	18.21	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di poinisi	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100,00%
*)	Peningkatan Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB		73 Desa	76 Desa	104,11%
*)	18.25	Peentase Desa miskin yang memiliki Kampung KB	73 Desa	76 Desa	104,11%
24	Program DKM Poinisi				
Sekebiat Poinisi					
I.24	Dukungan Manajemen di Poinisi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan tn/002)		13 Bulan	13 Bulan	100,00%
	24.1	Peentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Pewakilan BKKBN Poinisi)	100 %	100 %	100,00%
	24.2	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan pekantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
	24.3	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Poinisi (Keuangan dan BMN, Peencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Obta)	12 Bulan	12 Bulan	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	PERSENTASE CAPAIAN
28	Program Akuntabilitas Pengelolaan (pengawasan) Proinsi			
	Pengawasan Proinsi			
	I.28 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di proinsi	1 LHP	1 LHP	100,00%
	28.1 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1 LHP	1 LHP	100,00%
33	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan Proinsi			
	Labang Proinsi			
	I.33 Jumlah SDM proinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	337 Orang	303 Orang	89,91%
	33.1 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	532 Orang	598 Orang	112,41%
	II.34 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Proinsi yang dimanfaatkan	3 Hasil Penelitian	3 Hasil Penelitian	100,00%
	33.2 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	1 Hasil Penelitian	1 Hasil Penelitian	100,00%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2018 sebagai berikut

a. Program KKBPK Provinsi

Capaian kinerja kegiatan pada Program KKBPK Provinsi berada pada kisaran 43,11% sd 151,52%. Beberapa indikator kinerja kegiatan yang capaiannya masih dibawah 100% dan perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Penggeakan Pelayanan KB MKJP hanya tercapai sebesar 43,11%, faktor yang menghambat capaian kinerja ini adalah Penghentian sementara Klaim Penggeakan sampai dengan dimungkannya Jenis Penggeakan yang baru sebagai tindak lanjuteman BPK. Penerapan Jenis Penggeakan yang baru yang belum terakomodasi secara mendalam kepada petugas lini lapangan mengakibatkan endahnya klaim dana penggerakkan pada tahun 2018.

2. Keluarga yang memiliki badut terpapar 1.000 HPK hanya tercapai sebesar 89,30%. Hal tersebut dikarenakan kondisi jumlah keluarga yang mempunyai badut terpapar 1000 HPK sebanyak 10.762 merupakan perhitungan 1 (satu) kabupaten, sementara intervensi hanya difokuskan pada 10 desa lokasi. Sehingga belum semua target sasaran bisa digarap dengan optimal.

3. Jumlah keluarga yang memiliki lansia yang ikut BKL hanya tercapai sebesar 77,04%. Faktor yang menghambat pencapaian kinerja ini adalah Penghargaan lansia di DIY masih terkesan bejelan sendiri-sendiri, mengingat DIY adalah masyarakat aging population.

Selain ketiga indikator tersebut indikator kinerja yang lain dapat tercapai 100% bahkan lebih. Untuk pencapaian tertinggi ada pada indikator penanggulangan penyakit menular melalui promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota dengan pencapaian sebesar 151,52%

b. Indikator Kinerja Kegiatan DKM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan DKM selanjutnya berada pada kategori baik dengan pencapaian sebesar 100%.

c. Indikator Kinerja Kegiatan Akutabilitas Pengelolaan Pengabdian

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Akutabilitas Pengelolaan Pengabdian pada kategori Baik dengan pencapaian sebesar 100%.

d. Indikator Kinerja Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 3 indikator berada pada kategori baik dan baik sekali, dengan pencapaian antara 89,91% s.d. 112,41%. Meskipun kegiatan peningkatan kapasitas bagi ASN telah dialokasikan untuk seluruh ASN, namun Capaian Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluhan Keluarga Bencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas hanya tercapai 89,91% dikarenakan ada ASN yang tidak mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dikarenakan akuit

Keberhasilan pencapaian kinerja diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- Dukungan berbagai pihak yang menjadi mitra pelaksanaan Program KKBPK di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Tingginya komitmen dan perhatian dari stakeholder masyarakat dalam menerima Sosialisasi Program KKBPK
- Adanya Pedoman Ketahanan Keluarga tahun 2018 sebagai landasan bahasan pelaksanaan program ketahanan keluarga dilaksanakan dengan lintas sektor
- Terbentuknya beberapa kampung KB sebagai inisiatif untuk mengentah-pekerjaan pelaksanaan program KKBPK
- Adanya anggaran desa sebagai salah satu penunjang kebelakangan program KKBPK di tingkat desa

Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Program KKBPK di DIY antara lain :

- Belum optimalnya pemanfaatan media dalam advokasi dan KIE.
- Sosialisasi dan promosi program KKBPK belum sepenuhnya difokuskan pada sasaran

- Kurangnya sinergis program dan anggaran dengan mitra kerja terkait atau pengelola program dari tingkat provinsi hingga tingkat wilayah dalam melaksanakan pembinaan program KKBPK

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018 dengan Data Tahun Sebelumnya (2017 dan 2016)

Tabel 3.5

Perbandingan Tahun 2018 dengan Data Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	2016			2017			2018		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
A SASARAN STRATEGIS										
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) perWUS	N/A	N/A	N/A	1,86	2,06	89,25%	2,05	2,24	90,73%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)	N/A	N/A	N/A	58,63	53,3	90,91%	54,16	53,9	99,52%
3	Persentase penurunan angka ketidakbelangsaan pemakaian (tingkat pakai) kontrasepsi	N/A	N/A	N/A	25,30	28,4	87,75%	25,00	28,4	86,40%
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,20	11,5	40,28%	7,03	6,3	110,38%	7,70	6,3	118,18%
5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	31,70	39,36	124,15%	39,05	40,97	104,91%	41,77	47,20	112,99%
6	Jumlah peserta KB Aktif tambahan	N/A	N/A	N/A	14.840			9.119	3.931	43,11%
B SASARAN PROGRAM										
7	Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	29	32	89,66%	28	15	146,43%	16	15	106,25%
8	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	N/A	N/A	N/A	6,90	20,4	-95,65%	8,10	20,4	-51,88%
9	Median usia kawin pertama wanita	N/A	N/A	N/A	22,7	23,8	104,85%	23,5	23,8	101,44%
10	Persentase pengetahuan keluarga tentang isi kependudukan	48,00	54,2	112,92%	62,50	55,1	88,16%	52,60	56,8	107,98%
11	Persentase pengetahuan PUS tentang alat/ cara kontrasepsi (semua alat/ cara KB modern)	22,60	23,2	102,65%	43,70	30,6	70,11%	51,90	34,4	66,28%
12	Persentase Kabupaten/ Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00	23,75	118,75%

No	INDIKATOR	2016			2017			2018		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENASE
C INDIKATOR KEGIATAN										
13	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	62,80	62,4	99,36%	N/A	N/A	N/A	66,9	64,44	96,29%
14	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	73	76	104,11%
15	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25,00	100,00	400,00%
16	Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki badan terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13,31	17,27	129,76%
17	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 (Skor: 2,7)	3,45	172,50%
18	Persentase capaian kinerja	N/A	N/A	N/A	90	93,52	103,91%	90	75,76	84,18%
19	Persentase pencapaian mutu	N/A	N/A	N/A	95	99,04	104,25%	95	72,28	76,08%
20	Persentase penyerapan anggaran	N/A	N/A	N/A	95	89,94	94,67%	95	76,95	81,00%
21	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	N/A	N/A	N/A	100,00	100,0	100,00%	100,00	99,59	99,59%

Dari 21 (dua puluh satu) indikator Perjanjian Kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016-2018 terdapat 5 (lima) indikator yang selalu tercapai dari tahun 2016. Indikator tersebut adalah Persentase Keban ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need), Persentase Peserta KB Aktif MKJP, Angka Kelahiran Pada Remaja (ASFR 15-19 tahun), Persentase Pengetahuan Keluarga tentang Isu Kependudukan dan Persentase Pengetahuan PUS tentang alat/ cara kontrasepsi (sama alat/ cara KB Modern). Sedangkan 16 (enam belas) indikator lainnya tidak dapat dilakukan perbandingan kinerjanya dikarenakan indikator tersebut tidak selalu ada di setiap tahunnya.

3) Pebandingan Realiasi Kineja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

Tabel 3.6

Perbandingan Tahun 2018 dengan Jangka Menengah 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2018	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,10	2,24	93,33%	Diperkirakan tercapai
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	63,10	53,9	85,42%	Perlu upaya dan Strategi lebih kuat untuk mencapai target
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	10,00	6,3	136,98%	Sesuai Jalur untuk Diperhatikan
4	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	46,50	47,70	102,59%	Sesuai Jalur untuk Diperhatikan
5	Persentase tingkat pakuai kontrasepsi	24,51	28,4	84,13%	Perlu upaya dan Strategi lebih kuat untuk mencapai target

Dari capaian diatas diperoleh gambaran bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang sudah berjalan sesuai jalur dan diperkirakan tercapai. Namun 2 (dua) indikator lainnya masih memerlukan upaya dan strategi yang lebih kuat untuk mencapai target di tahun 2019.

4) Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pencapaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Angka Kelahiran Total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)

Pada indikator Angka Kelahiran Total (*TFR*) per WUS (15-49 tahun) di DIY tercapai sebesar 93,33% dari target *TFR* yang ditetapkan dalam KKP Tahun 2018 sebesar 2,10. Sesuai Data SKAP 2018, angka *TFR* tahun 2017 tercapai sebesar 2,24.

Meskipun DIY belum dapat mencapai target KKP yang ditetapkan namun kondisi ini masih jauh di bawah angka TFR Nasional sebesar 2,4.

Menteri Bku Penentuan Nilai Ideal dan Ambang Batas Parameter Kelangkaan Bencana Tahun 2017, nilai ambang batas TFR yang dibenarkan adalah antara 1,8 sampai 2,2. Bedasarkan nilai ambang batas ini, DIY telah berada pada nilai TFR ideal sejak tahun 1991 (nilai TFR adalah 2,04) dan itu berjalan sampai sekarang di 2017 (nilai TFR adalah 2,2). Ini menunjukkan bahwa selama hampir 30 tahun kondisi TFR di DIY telah ideal. Tetapi tetap perlu diupayakan adanya tendensi kenaikan angka capaian TFR.

2. **Persentase Prevalensi Pemakaian Konsep SModern (mCPR)**
Bedasarkan data SKAP 2018 Perwakilan BKKBN DIY telah mampu mencapai persentase mCPR sebesar 85,70% dari target yang ditetapkan, yaitu 53,9% dari total PUS yang ada, dimana target KKP sebesar 62,89%. Hal ini menunjukkan Kinerja Perwakilan BKKBN DIY dalam pencapaian mCPR belum dapat memenuhi target KKP yang ditetapkan. Kondisi ini salah satu disebabkan oleh naiknya pengguna konsep tradisional, karena secara umum CPR naik namun rendah pada mCPR, dengan ditunjukkan CPR 65% dan 11,2% untuk konsep tradisional.

3. **Persentase Angka Ketidakefektifan Pemakaian (Tingkat Putus Pakai) Konsep**
Tahun 2018 Perwakilan BKKBN DIY ditargetkan untuk menurunkan Tingkat Putus Pakai menjadi sebesar 24,91%. Bedasarkan Data SKAP 2018, tingkat putus pakai konsep di DIY sebesar 28,40%. Kondisi ini menunjukkan bahwa DIY belum mampu menekan angka Tingkat Putus Pakai di bawah target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 85,98%. Tingkat

perilaku ini rentan pada PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik, masih tinggi angka pemakaian kontrasepsi pada alat tersebut menjadikan peluang meningkatkan persentase tingkat perilaku menjadi lebih besar.

4. Persentase Kebutaan Berencana -KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*)
Pada tahun 2018 berdasarkan data SDKI 2017, Persentase *Unmet need* di DIY sebesar 6,3%. Angka tersebut menunjukkan bahwa *unmet need* sudah tercapai sebesar 138,41% dari target KKP yang ditetapkan sebesar 10,23%. Keberhasilan penurunan angka *unmet need* tidak lepas dari aksi-aksi strategis dari Perwakilan BKKBN DIY, mulai dari promosi, KIE juga advokasi.
5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP
Berdasarkan data SKAP 2018 Peserta KB Aktif tercapai sebesar 47,70%. Kondisi capaian tersebut 3,58 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan atau tercapai sebesar 108,11 %. Pembinaan kesetaraan berKB MKJP terus dilakukan melalui program pengembangan kelompok BKB, BKR, BKL serta UPPKS.
6. Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan
Kondisi jumlah Peserta KB Aktif DIY tahun 2018 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian peserta KB Aktif tambahan hanya sebanyak 3.931, artinya hanya mampu mencapai sebesar 43,11% dari target Penambahan peserta KB baru yang lebih kecil dari jumlah drop out menjadikan tidak adanya penambahan pada peserta KB Aktif sehingga target tersebut tidak dapat dicapai. Secara absolut angka peserta KB baru sebanyak 41.379 (data SR 2018) sedangkan drop out sebanyak 100.285

7. Angka Kelahiran Pada Remaja (ASFR 15-19 thn)

ASFR 15-19 thn di DIY pada thn 2018 adalah 15, angka ini 1 point lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 16 atau tercapai sebesar 106,25%. Hal tersebut menggambarkan bahwa program Genre sudah berjalan baik di DIY sehingga dapat menekan angka kelahiran pada usia remaja. Salah satunya dengan pembinaan kelompok PIK secara berkala, baik pada jalur masyarakat maupun jalur pendidikan.

8. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15 -49 thn)

Kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15 -49 thn) di DIY sebesar 20,4% sedangkan target K KP hanya sebesar 8,10% sehingga pada indikator tersebut belum tercapai dengan persentase pencapaian -51,88%. Hal tersebut dikarenakan penggunaan metode kontrasepsi non MKJP dan tradisional masih tinggi sehingga memiliki peluang yang lebih besar terhadap kejadian kegagalan dan dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan pada PUS. Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi tradisional yang cukup signifikan di thn 2018 memungkinkan menjadi kontribusi terhadap peningkatan angka kehamilan yang tidak diinginkan.

9. Median Usia Kawin Pertama

DIY mampu meningkatkan median usia kawin pertama. Tahun 2018 median usia kawin pertama sebesar 23,8 yang berarti dapat mencapai 101,44% dari target yang ditetapkan sebesar 23,5. Hal tersebut didukung oleh keberhasilan program Genre di DIY melalui kampanye Triad KRR bagi remaja.

10. Persentase pengetahuan keluarga tentang isukependdikan

Pada indikabr sasaran program ini, pencapaian DIY dalam kategori baik sekali dengan persentase capaian 107,98%, lebih tinggi 4,2 poin dari target yang ditentukan. Keberhasilan capaian ini didukung oleh semua komponen dalam melakukan KIE kependdikan baik melalui jalur pertemuan langsung, pemanfaatan media cetak maupun video KIE kependdikan.

11. Persentase pengetahuan PUS tentang metode alatkon tasepsi (semua alat/cara KB modern).

Berdasarkan hasil survei SKAP 2018, pengetahuan PUS tentang semua metode kontrasepsi modern di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 34,40%, sementara target KKP 51,90% sehingga hanya tercapai sebesar 66,28%. Kondisi ini sudah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercapai 30,60%, artinya dalam satu tahun terakhir Perwakilan BKKBN DIY telah mampu meningkatkan capaian sebesar 4,44%. Belum merata penyebaran pengetahuan tentang kontrasepsi dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat pengetahuan PUS. Masyarakat cenderung hanya mengetahui metode kontrasepsi yang digunakan. Upaya pemberian *inform choice* perlu terus ditingkatkan sehingga peserta KB dapat mengetahui semua metode yang ada dan dapat memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan.

12. Persentase Kabupaten /Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependdikan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan Berbasis Kependdikan.

Berdasarkan surat dari Plt Deputi Bidang Pengendalian Penddikan, indikator ini dapat diukur dari persentase Rumah Data

Kependudukan yang sudah terbenak di kabupaten/kota. DIY telah dapat memanfaatkan dengan optimal Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung Kebijakan Pembangunan Berbasis Kependudukan. Hal ini terdampak dari capaian melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 118,75% dengan nilai absolut 3,75 poin lebih tinggi dari target Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini disebabkan karena komitmen yang kuat dari DIY untuk terus bekerja sama dengan lintas sektoral baik instansi pemerintah maupun swasta untuk memaksimalkan program kependudukan beriringan dengan program yang telah berjalan pada instansi tersebut misalnya KKN di perguruan tinggi. Terintegrasinya program ini memunculkan peluang untuk terus menambah terbenak rumah data di setiap wilayah kampung KB yang telah terbenak

13. Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja

Indeks pengetahuan kesehatan reproduksi remaja baru mampu mencapai 96,29% sehingga kurang 2,64 poin untuk dapat tersesai dengan target Angka capaian ini diperoleh dari data SKAP 2018. Belum berhasilnya DIY pada indikator ini terutama pada rendahnya pengetahuan remaja tentang masa subur yang disebabkan oleh masih kurangnya penekanan materi KIE tentang masa subur bagi remaja.

14. Jumlah Kampung KB yang Dicanangkan

DIY memberikan prestasi yang baik dalam capaian Kampung KB yang dicanangkan, hal ini terdampak dari tercapai 104,11% dari target yang ditetapkan. Ada 3 Kampung KB tambahan yang dapat dicanangkan oleh DIY diluar target yang ada. Beriringnya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah di level kabupaten/kota yang mendorong untuk terbenak secara legal

dengan adanya Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembinaan Kampung KB. Selain itu peran kat dalam membina hubungan dengan stakeholder dan lintas sektor terkait sangat mendukung terhadap suksesnya pencanaan kampung KB ini.

15. Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB.

Seluruh Kampung KB di DIY yang telah terbentuk memiliki POKJA Kampung KB. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian DIY pada indikator ini sebesar 400%, DIY mampu mencapai target 75% lebih banyak dari yang ditetapkan. Keberhasilan ini tak lepas dari berbagai kegiatan pendukung yang telah dilakukan seperti Advokasi kepada pemerintah daerah, pembinaan di wilayah Kampung KB oleh pembina wilayah masing-masing Kabupaten /Kota yang sangat intensif dengan program kerja yang jelas. Selain itu kegiatan lain yang mendukung seperti pelatihan bagi Pokja Kampung KB sehingga dapat memperlambat dan mendorong kinerja POKJA Kampung KB.

16. Persentase Orang Tua Hebat yang Memiliki Badan Terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan

Berdasarkan data DALLAP 2018 diperoleh angka pencapaian indikator ini sebesar 100,76%. Persentase ini menunjukkan pencapaian kinerja yang baik sekali dengan nilai absolut 3,94 point melebihi target Kinerja yang baik sekali ini disebabkan oleh promosi HPK yang telah berjalan dengan baik secara intensif baik di wilayah sasaran khusus seperti wilayah dengan persentase Balita stunting yang tinggi maupun di wilayah lain dengan sasaran keluarga yang memiliki Badan. Selain itu promosi HPK

juga selalu diberikan pada kegiatan pertemuan BKB dan penyuluhan di kelompok BKB.

17. Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tahun 2018 penyelenggaraan SPIP Perwakilan BKKBN D.I Yogyakarta berada pada tingkat matius pada level terdefinisi atau 3 dari 6 tingkat matius SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian matius menghasilkan nilai matius SPIP sebesar 3,45, nilai yang diperoleh ini telah mencapai 172,50% jika dibandingkan dengan target Berdasarkan kondisi ini capaian kinerja yang ditunjukkan di level sangat baik. Kinerja ini ditjang oleh komitmen dari level Pimpinan sampai staf dalam pelaksanaannya .

18. Persentase Capaian Kinerja

Berdasarkan aplikasi SMART Kemenkeu capaian kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2018 sebesar 82,45%, hal ini berarti capaian masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Hal tersebut dikarenakan tidak jelasnya dasar pelaksanaan/ jenis anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal.

19. Persentase Pencapaian Optu

Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2018 hanya mampu merealisasikan optu sebesar 80,87%. Capaian tersebut hanya sebesar 85,13% dari target yang seharusnya sebesar 95%. Berdasarkan aplikasi SMART capaian optu rendah adalah Peningkatan Penggerakan KB MKJP yang hanya terealisasi sebesar 16,16%. Hal tersebut disebabkan oleh terbanyak jenis penggerakan yang baru dengan ketentuan dan syarat klaim yang lebih rinci dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga

bank Pegas KB yang tidak mengirimkan klaim dana penggerakan tersebut

20. Persentase Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran tahun 2018 ini berdasarkan aplikasi SMART sebesar 76,95%. Kondisi ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 95%. Rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan oleh ketidakpastian pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi Jadwal Kegiatan yang telah diagendakan sehingga banyak kegiatan yang belum terlaksana sampai dengan tgl berakhir tahun 2018 dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sampai di akhir tahun.

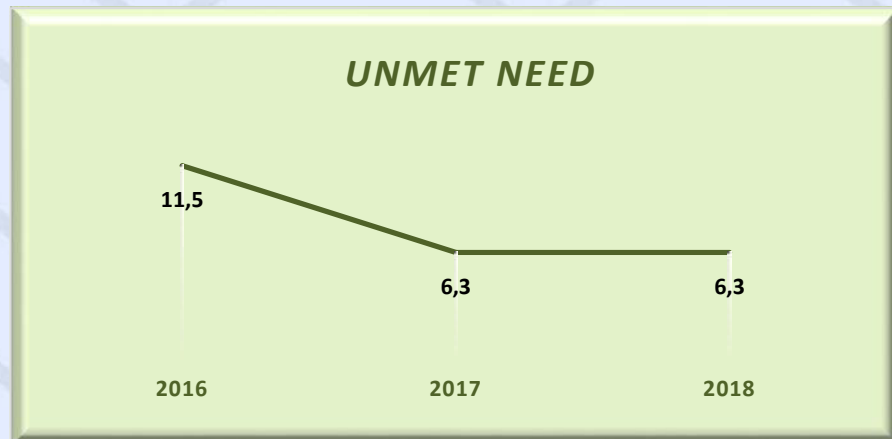
21. Persentase BMN yang telah ditetapkan satu pengguna

Berdasarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Satu Pengguna dari Kementerian Keuangan dan BKKBN, persentase BMN yang telah ditetapkan satu pengguna sebesar 99,54%. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan dikarenakan adanya pembelian belanja modal yang di akhir tahun sehingga belum bisa dicatatkan sesuai basis akuntansi yang ditentukan.

5) Analisis Kenaikan atau Penurunan Kinerja

Dari 21 (dua puluh satu) indikator yang ada dalam perjanjian kinerja, hanya 5 (lima) indikator yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2016. Sehingga hanya 5 (lima) indikator tersebut yang bisa dianalisa kenaikan atau penurunan kinerjanya. Perkembangan kinerja dari kelima indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

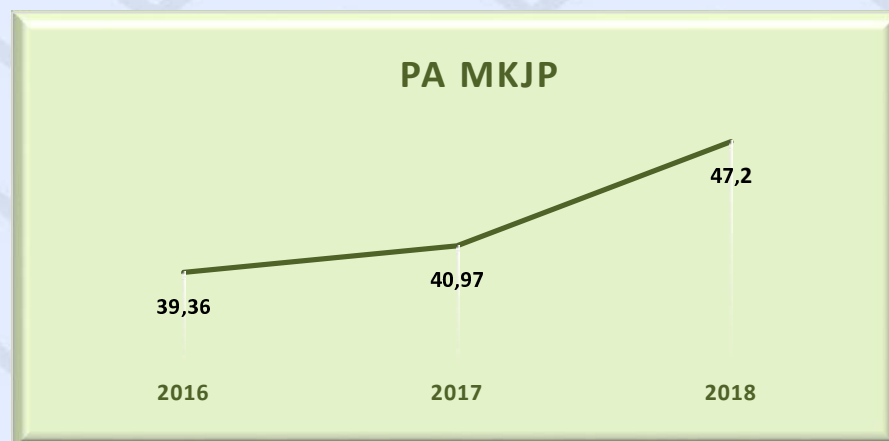
1. Persentase Kebutan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)



Gambar 3.1. Grafik Perkembangan UnmetNeed

Selama tiga tahun terakhir, pada indikator persentase kebutan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) mengalami tendensi penurunan dari 11,5% pada tahun 2016 menjadi 6,3% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja Perwakilan BKKBN DIY dalam menurunkan *unmet need*.

2. Persentase Peserta Aktif MKJP



Gambar 3.2. Grafik Perkembangan Persentase PA MKJP

Hal yang sama ditunjukkan oleh indikator kinerja pencapaian persentase peserta aktif MKJP yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 ke tahun

2018 mengalami peningkatan yang signifikan, sekitar 6%. Capaian ini menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY berkomitmen untuk mempromosikan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang kepada masyarakat mengingat efektifitas dalam mencegah kehamilan yang lebih baik dibandingkan metode kontrasepsi jangka pendek.

3. Angka Kelahiran Pada Remaja (ASFR 15-19 Tahun)

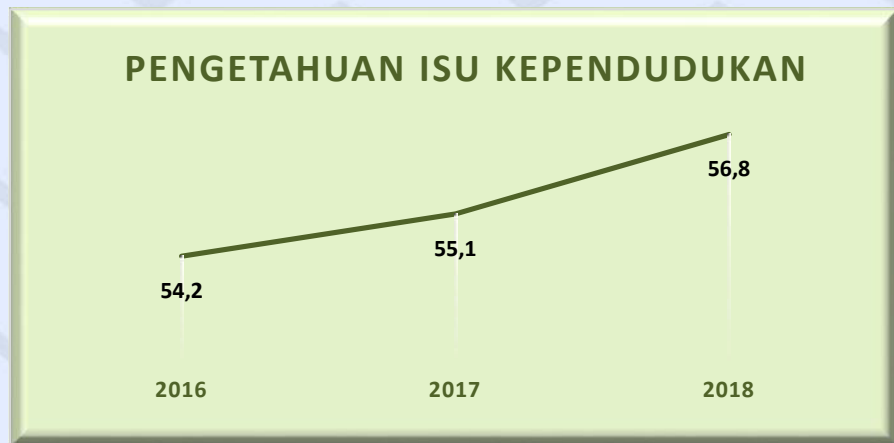


Gambar 3.3. Grafik Perkembangan ASFR 15-19 Tahun

Indikator kinerja lain yang menjadi fokus kinerja Perwakilan BKKBN DIY adalah mengurangi angka kelahiran (ASFR) pada remaja usia 15-19 tahun dari 32 kelahiran per1000 wanita di tahun 2016 menjadi 15 kelahiran per1000 di tahun 2018. Pada indikator ini terlihat penurunan angka ASFR sehingga mempekat optmisme untuk dapat mencapai target di tahun-tahun mendatang. Namun, meskipun kinerja ini telah menunjukkan keberhasilan, tetapi masih harus menjadi fokus sasaran kinerja mengingat risiko tinggi jika melahikan di bawah usia 21 tahun.

4. Peningkatan Pengetahuan Keluarga Tentang IsKependudukan

Berkaitan dengan pendapat dan praktik keluarga tentang isKependudukan, telah ditetapkan indikator kinerja: Keluarga yang mengetahui tentang isKependudukan.

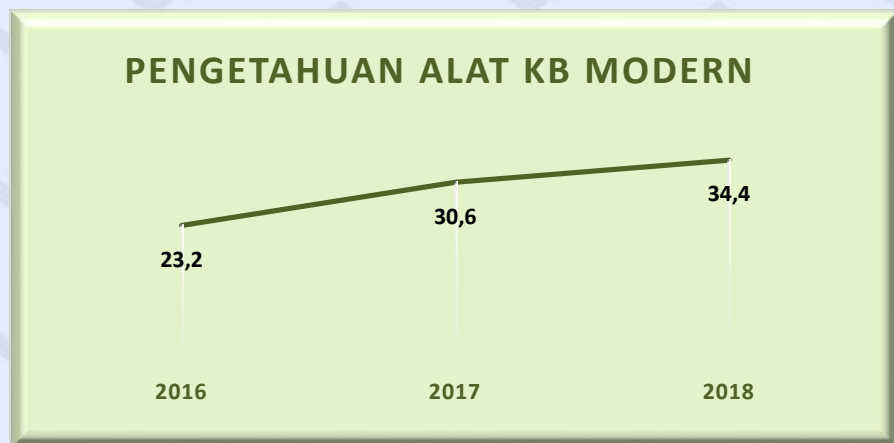


Gambar 3.4. Grafik Perkembangan Pengetahuan Isu Kependudukan

Indikator Indeks isukependudukan merupakan indeks komposit dari beberapa indeks yaitu indeks pendapatan tentang pengendalian kelahiran; indeks pendapatan tentang dampak brk penambahan penduduk, indeks pendapatan tentang remaja perempuan menikah kurang dari 20 tahun, indeks pendapatan tentang keluarga menginginkan banyak anak (lebih dari 3 anak), indeks pendapatan tentang mdik pada saat ibu indeks pendapatan tentang persiapan masa tua yang lebih baik, dan indeks perilaku membuang sampah. Dalam 3 tahun terakhir indeks isu kependudukan menunjukkan peningkatan meskipun hanya sekitar 2%. Sehingga masih diperlukan usaha untuk meningkatkan indeks tersebut melalui berbagai inovasi dan sosialisasi tentang isu-isukependudukan.

5. Persentase Pengetahuan Pasangan Usia Subur Tentang Alat/Cara KB Modern

Dalam kinerja mempromosikan berbagai metode kontrasepsi modern yang terdiri dari Sterilisasi Wanita, Sterilisasi Pria, Pil, Suntikan, Implan, IUD, dan Kondom Pria juga menunjukkan peningkatan.



Gambar 3.5. Grafik Perkembangan Pengetahuan AlatKB Modern

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya persentase pengetahuan pasangan usia subur tentang alat/cara KB modern, dari 23,2% di tahun 2016 menjadi 34,4% di tahun 2018. Meskipun capaian indikator ini menunjukkan tendensi yang meningkat, capaian saat ini masih jauh dari target yang ditentukan. Jadi, diperlukan program strategis dan inovasi agar capaian indikator ini dapat tercapai di tahun depan.

6) Analisis Program dan Kegiatan Dalam Mendukung Capaian Kinerja

Pencapaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta didukung dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Program KBPK di DIY

a. Sinkronisasi (penyerasian) Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Seluruh Tingkat Wilayah

- Penyusunan dokumen GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) 5 aspek/mata ukur GDPK Kabupaten Bantul, GDPK Kabupaten Sleman, GDPK Kabupaten Kulon Progo, GDPK Kota Yogyakarta dan GDPK DIY

- Penyusunan buku profil tematik kependudukan di 3 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan 1 DIY
- Penyusunan policy brief kajian analisis dan kajian model solusi dampak kependudukan.
- Implementasi Pendidikan Kependudukan Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebanyak 20 (dua puluh) kelompok KKN (UAD dan STPMD APMD)
- Pembentukan SSK tingkat SMA di 4 Kabupaten
- Monev SSK di SMPN 1 Sragen Sleman dan SMPN 1 Galuh Kulonprogo
- Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di SSK tingkat SMA baik untuk Pengajar maupun Siswa
- Workshop penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SSK untuk Kepala Sekolah dan Guru SSK tingkat SMA.

b. Pembinaan Kesehatan Ber-KB dan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB yang Sesuai dengan Standar Pelayanan KB di Seluruh Tingkat Wilayah

- Penggeakan KB MKJP sebanyak 4.913 pasang KB
- Pelayanan Pencabutan Implant sebanyak 477 kasus
- Pelayanan KB Bergejala secara gratis sebanyak 21 keluarga di 4 Kabupaten yang berhasil menjangkau 2.014 akses perorangan dengan 644 diantaranya adalah pasang KB baru dengan berbagai alat kontrasepsi (IUD 725, Implant 1.100, MOP 70, MOW 113, dan 6 sisk).
- Pelayanan KB Gratis dalam momen Bulan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan di 5 KODIM di DIY
- Lomba Motivasi KB Pria

- Sosialisasi dan KIE Kesetaraan KB, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Kegiatan Pelayanan KB MKJP di Kampung KB sebanyak 15 frekuensi atau frekuensi per Kabupaten/Kota.
 - Orientasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Pelayanan KB Bagi IBI.
 - Sosialisasi Kebijakan Ketersediaan dan Pemanfaatan Kontrasepsi di Fakes
 - Perencanaan dan Distribusi Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi kepada ibu materi kesehatan kepada kelompok kegiatan, fakes dan petugas lapangan KB.
 - Deteksi Dini KAR Tim Pemas Pelayanan KB MKJP
 - Sosialisasi Materi Hindari 4 Tetangga
 - Promosi Pelayanan KBKR Berkualitas dalam era JKN bersama Mitra Kerja sebagai pengintegrasian kegiatan pelayanan KB GATS Menabung Sesi pelatihan Talkshow dan KIE bertempat di RS Haji Klaten
 - Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Kelompok KB Pria kepada 102 Kelompok KB Pria masing-masing sebanyak 6 frekuensi/bulan
- c. Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pembedayaan Keluarga di Seluruh Tingkat Wilayah
- Gerakan Ketahanan Keluarga pada Hari Keluarga Provinsi
 - Sosialisasi BKB dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)
 - Pembinaan Kelompok BKB HI
 - Gerakan pengabdian Anak usia 6 -10 tahun dalam angka HAN

- Penyelenggaraan Hari Remaja dan Jambore Ajang Kreatifitas (JAK) tingkat provinsi dengan melibatkan unsur Polresta, BNPB dan BPPM
 - Dukungan Pembinaan terhadap 35 kelompok PIK R
 - Orientasi peningkatan keterampilan hidup remaja bagi pengelola Genre tingkat kabupaten/kota, yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pendidikan sebagai PIK R
 - Orientasi Teknis Saka Kencana bagi Pamong dan Instansi kabupaten/kota
 - Orientasi Ketahanan Keluarga Remaja untuk kelompok BKR
 - Pelaksanaan kegiatan BKR di Kampung KB
 - Pembentukan CoE BKL untuk BKL Mgi Waras Kabupaten Sleman dan BKL KhuluKhotmah Kabupaten Bantul
 - Dukungan Pembinaan Kelompok BKL
 - Integrasi Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga Dengan Dinas Terkait
 - Fasilitas Pembinaan Kelompok UPPKS di Kampung KB
 - Dukungan ATTG Bagi Kelompok UPPKS
 - Pengembangan dan Sosialisasi Media KIE Penjajanan Generasi Emas Sesuai Kearifan Lokal
 - Pengembangan dan Sosialisasi Materi dan Media KIE Kelanjutan Sesuai Kearifan Lokal
 - Gerakan Nasional Pendampingan Pendidikan Jangka Panjang Bebas Kelangkaan
- d. Stakeholder mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkat wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE Program KKBP

- Pengembangan Advokasi dan KIE Program KKBPK di Kampung KB sebanyak 3 (tiga) kegiatan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota.
- Fasilitas Advokasi PKKBP Melalui Kegiatan Momentu Kedamaian sebanyak 3 (tiga) kegiatan melalui kegiatan Pencanangan TNI Manunggal KB Kesehatan, Pagelaran Wayang Kulit dan Pertemuan Koordinasi PKK tingkat Provinsi dalam rangka memperingati Hari Ibu
- Sosialisasi materi dan informasi Advokasi dan KIE program KKBPK melalui pencetakan leaflet
- Pengembangan dan Produksi Media Advokasi dan KIE Program KKBPK berupa produk sosial media banner sebanyak 1000 HPK sebanyak 250 buah, souvenir KIE KB, dan merchandise KIE KB.
- Promosi dan KIE Program KKBPK melalui infografis dan videografis sebanyak 4 ILM dengan judul: Menjadi Orang Tua Hebat Aku Bisa, Kampung KB, Cinta Kelarga Cinta Teencana.
- Pencetakan dan pendistribusian Buku Saku MKJP bagi PPKBD/Sb PPKBD sebanyak 700 buah
- Pertemuan KKBPK tingkat Kecamatan/Rakotam dan tingkat Desa/Rakodes
- Jamboe Geit PPKBD
- Pelaksanaan Selfikasi Penyulu KKBPK ke Provinsi
- Pertemuan Peningkatan kapasitas TI bagi Penyulu KKBPK ke provinsi
- Jamboe (Orientasi) Program KKBPK ke Provinsi bagi PKB/PLKB
- Pemuktahiran Basis Data Kelarga Indonesia
- Rapat Pengendalian Program dan Anggaran

- Peremban Lengkap IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) Tingkat Desa/Kelurahan di 438 desa dengan frekuensi 2 (dua) gerak
- Dokumen Operasional Program KKBPK bagi PKB dan IMP sebanyak 2 (dua) gerak
- Fasilitas Pencanaan dan Pembinaan Kampung KB di desa tertinggal sebanyak 76 desa
- Pengembangan center of excellence (COE) pengelolaan Kampung KB di Kampung KB Jasm.

2. Program Dokumen Manajemen Provinsi

- Pembayaran gaji dan uang makan pegawai
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor, seperti operasional langganan listrik, telepon, ban, pemeliharaan gedung, bangunan dan halaman, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran tahun 2018.
- Fasilitas Pencanaan DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2018
- Asesment bagi pegawai yang diikuti 13 pegawai
- Fasilitas salah satu tima PKB/PLKB dari Pegawai Daerah menjadi Pegawai Pusat
- Rekonstruksi (Penyamaan Data) laporan keuangan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
- Fasilitas penyusunan laporan keuangan
- Pengaturan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, sepeda Mobil

Operasional, PC, Printer, LCD Proyektor, Genset Meja dan Kursi Diklat Podium

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akutabilitas Aparatur BKKBN

- Sosialisasi SPIP
- Sosialisasi penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)

4. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi

a. Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan Tenaga Regional)

- Pelatihan Program KKBPK Bagi Tim KB Desa diikuti oleh 29 orang.
 - Pelatihan Teknis Pengawasan Program KKBPK Bagi PKB/PLKB diikuti oleh 96 orang PKB/PLKB.
 - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis bagi PKB/PLKB diikuti oleh 96 orang PKB/PLKB.
 - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial bagi PKB/PLKB diikuti oleh 94 orang.
 - Pelatihan Strategi Konseling Beimbang diikuti oleh sebanyak 59 orang dokter bidan, perawat dan perkesmas di Kabupaten Kulon Progo.
 - Pelatihan Teknis Program KKBPK Bagi Toga, Tomat, Tenda dan Mitigasi dengan peserta sebanyak 86 orang.
 - Pelatihan Kampung KB dengan peserta sebanyak 138 Orang.
- b. Hasil -Hasil Penelitian dan Pengembangan Program
- Survei Kinerja dan Akutabilitas Program (SKAP) 2018
 - Penelitian dan Penyajian Hasil SDKI 2017

- Kajian Penelitian Program KKBPK bekerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta

7) Langkah – langkah ke depan

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan keahlihan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melaksanakan kesetaraan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor KB ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dan difokuskan pada wilayah dengan pencapaian PA rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB dengan memanfaatkan analisis devinfo yang sudah dilakukan per kecamatan ;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintegrasi dengan pelayanan papsmear.
5. Mengintensifkan pembinaan Kampung KB dan mendorong Selub Kabupaten/Kota untuk membentuk Kampung KB percontohan
6. Mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarkan program KKBPK

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 86.933.790.000,-. Anggaran ini lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 36.468.950.000,-. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.464.840.000,- atau 58,05%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai karena adanya peralihan status kepegawaian PKB/PLKB. Data berikut merupakan realisasi anggaran pada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta per program

Tabel 3.7

Rincian Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Program	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5297	Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Proinsi	18.035.672	16.580.599	91,93	61.459.151	49.364.963	80,32
5298	Pengelolaan Program pengawasan Proinsi	194.085	191.714	98,78	205.000	196.313	95,76
5299	Pengelolaan Program Pelathan dan Pengembangan Proinsi	2.667.898	2.619.586	98,19	3.748.659	3.368.212	89,85
3331	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pro insi	15.571.295	13.408.470	86,11	21.520.980	14.029.261	65,48
Total Pagu Anggaran		36.468.950	32.800.370	89,94	86.933.790	66.896.318	76,95

Sumber data : Subbag. Keangnan dan BMN

Dari tabel di atas, menunjukkan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 76,95%. Realisasi program terendah ada pada Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi yaitu 65,48%. Adapun penyebab rendahnya realisasi anggaran pada program tersebut karena terdapat kegiatan yang belum optimal pencapaiannya.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran masih terdapat hambatan dan kendala antara lain :

- a. Kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai AJK hal ini menyebabkan rencana penarikan dana tidak dapat tersisa secara tepat sehingga masih ditemukan defiasi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang merupakan salah satu indikator dalam evaluasi pelaksanaan anggaran.
- b. Keterlambatan jenis dan spesifikasi teknis terkait pengadaan dari BKKBN pusat sehingga menyebabkan penundaan realisasi pada akhir tahun anggaran ini.

C. **K** **D** **C** **L**

Selain capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2018, juga terdapat beberapa capaian lainnya yang telah dicapai oleh Perwakilan BKKBN DIY sampai dengan Tahun 2018. Capaian tersebut antara lain :

1. Akreditasi A Bidang Lapangan

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No. 10 tahun 2017 tentang Akreditasi Lembaga Diklat Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, maka Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta



mendapatkan Akreditasi A sebagai Lembaga Diklat Bidang Kependidikan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dengan skor sebesar 96,92. Pencapaian ini merupakan

satu-satunya Bidang Latbang dan satu Akreditasi A, diantara 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Pencapaian Akreditasi A ini menjadikan Bidang Latbang Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta menjadi satu-satunya lembaga diklat di perwakilan yang dapat menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan dan melakukan pembinaan/pendampingan kegiatan pelatihan bagi lembaga diklat yang masih terakreditasi B atau yang belum terakreditasi.

2. Tingkat Maturitas SPI el 3,45



Penyelenggaraan SPI Perwakilan BKKBN D.I Yogyakarta pada Tahun 2018 berada pada tingkat maturitas pada level terdefinisi atau dari 6 tingkat maturitas SPI. Penilaian terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPI sebesar 3,45.

Dengan tingkat maturitas terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPI Perwakilan BKKBN DIY secara umum menunjukkan bahwa unit organisasi telah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten.

3. Percontohan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI WBK)

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan BKKBN. Proses



pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan Program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengabdian, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang berfokus pada

Pada tanggal 17 April 2018, Peraturan BKKBN DIY ditunjuk sebagai satuan kerja/unit kerja percontohan yang melaksanakan

pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan Wilayah Bebas dari Melanji (WBBM) di lingkungan BKKBN dengan Surat Keputusan dari Pelaksana Tugas Kepala BKKBN nomor 40/kep/c/2018

4. Pembentukan CoE BKL

Kelompok Bina Keluarga Lanjut (BKL) Mgi Waas Blendong, Sumber, Moydan dican dicanangkan sebagai Center of Excellence (CoE) oleh BKKBN Pusat di Kantor Sekretariat Kelompok BKL Mgi Waas Senin (30/7/18).



Pencanangan tersebut dilakukan secara

simbolik oleh Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Pusat, Sinit Prihutomo didampingi oleh Bupati Sleman, Sirpu nomo. Pencanangan CoE BKL selanjutnya adalah Kelompok BKL Khasu Khotmah, Kecamatan Piyangan, Kabupaten Bantul pada tanggal 01 Agustus 2018 oleh Aisn Pemeintahan dan Kepala Setda DIY (Drs. Slip, SH., CN., M.Si.).

Maksud dan tujuan dicanangkannya CoE BKL tersebut adalah sebagai tempat rujukan, percontohan dan pembelajaran bersama dalam mengelola keberlangsungan sebuah kelompok sekaligus proses pelaksanaan berbagai program atau kegiatan pendampingan Lansia, juga pengembangan akses dengan merangkul mitra kerja terkait

5. Pembentukan CoE Kampung KB

Kampung KB merupakan wilayah yang diharapkan bisa menjadi lokasi pengembangan program KKBPK. Seiring dengan berjalannya waktu maka bisa dilihat perkembangan Kampung KB yang tidak sama antar wilayah.

Kampung KB Jasem merupakan salah satu contoh Kampung KB yang mampu berkembang dan berperan aktif sehingga terpilih menjadi Center of Excellence atau Kampung KB percontohan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Beberapa petmbangan dipilihnya Kampung KB Jasem sebagai COE Kampung KB antara lain terdapatnya segala pembentukkan Kampung KB, adanya POKJA Kampung KB dari 11 aspek, memiliki sumber pendanaan diluar APBN, dan adanya komitmen sektor lain minimal lima sektor (termasuk sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi) melalui program kegiatan yang ada di Kampung KB. Adanya CoE Kampung KB diharapkan bisa menjadi tempat belajar baik dari sisi pengelolaan maupun dari kegiatannya bagi Kampung KB lain baik dari dalam maupun luar DIY.

6. Penghargaan Khusus Instansi Pemasang Jaringan ILM

Perwakilan BKKBN DIY menerima penghargaan khusus sebagai instansi pemasang ILM dalam rangka Anugerah Penyiaran DIY tahun 2018. Ada 19 kategori yang dilombakan, termasuk di dalamnya 6



kategori khusus yang diberikan kepada televisi sistem basis jaringan yang menayangkan program lokal terbanyak, tokoh pemerhati penyiaran DIY, Lembaga peduli penyiaran, mitra strategis KPID DIY, mitra strategis Radio Komunitas dan Instansi Pemasang ILM.

7. Peringkat Nasional Pelaksanaan SKAP Tahun 2018

Puslitbang KB dan KS melakukan evaluasi pengumpulan data untuk menjamin kualitas data SKAP 2018. Terdapat beberapa kriteria dalam melakukan evaluasi, diantaranya adalah persentase responden menjawab instrumen/kuesioner penelitian secara valid yang telah ditetapkan dengan analisis di lapangan, akurasi pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, banyaknya responden yang karena diblok oleh manajer data pada kelengkapan dokumen pendukung, pentingnya jabatan Tidak terdapat petinggi amat need, dan perhitungan age heaping untuk mengetahui potensi pencacah/entertainment menghindari 15 dan 49 tahun.



Dari semua kriteria tersebut Pelaksanaan SKAP di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan total nilai 950,5 poin dan berhasil menjadi

peringkatsadar i tga pl empat provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan komitmen Bidang Labang Perwakilan DIY dalam menjaga kualitas dan yang dapat diperanggungkan sebagai sebuah tradisi yang harus selaluditingkatkan.

8. Jara Perlombaan Tingkat Nasional

1) Jara I Tingkat Nasional Lomba Orang Tua Hebat

Banyak kegagalan dalam pengasuhan anak, bukan karena kurangnya kasih sayang orang tua kepada anak, melainkan karena sebagian orang tua tidak tahu bagaimana cara mengasuh anak dengan baik dan benar. Melalui program BKB sebagai salah satu wadah untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pembinaan tumbuh kembang anak yang dilakukan semenjak anak dalam kandungan guna mejadikan SDM berkualitas, merupakan salah satu strategi dalam pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik Integratif (BKB - Posyandu - PAUD).



Dan lomba menjadi Orang Tua Hebat merupakan bagian dari posbehaing dan telah diadakan manfaathya keberadaan kelompok BKB dalam membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pembinaan tumbuh kembang anak. DIY mendapatkan juara I tingkat Nasional yang diikuti oleh orang tua atas nama NdarA Saptu dan OkkyD Cahyandair dari Kota Yogyakarta, sekaligus menerima penghargaan pada saat Hari Keluarga Nasional di Manado.

2) Juara I Tingkat Nasional Lomba Kelompok BKL

Kelompok BKL sebagai wadah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang



memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kelompok BKL dinyatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam memajukan lansia yang berakad kepada Tuhan Yang

Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat atau telah mampu menerapkan 7 dimensi lansia yang baik.

Kelompok BKL Melati inilah yang memiliki DIY karena telah mampu melaksanakan dan menerapkan 7 dimensi lansia yang baik kepada para anggotanya, dan berhasil meraih juara I tingkat Nasional sekaligus menerima penghargaan pada saat Hari Keluarga Nasional di Manado.

3) Juara I Tingkat Nasional Lomba Kelompok BKB

Kelompok BKB sebagai salah satu wadah untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pembinaan tumbuh kembang anak yang dilakukan semenjak anak dalam kandungan guna memajukan SDM berkualitas merupakan kegiatan

pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik Integratif (BK B - Posyandu - PAUD).

DIY mendapatkan Juara III Tingkat Nasional diwakili Kelompok BKB Pemabahari dari Kota Yogyakarta, menerima penghargaan pada saat Hari Kelurga Nasional di Manado.



- 4) Juara II Tingkat Nasional Lomba Promosi Konseling Kepada KBPPPK Rumah Sakit



RSUD Prambanan berhasil meraih Juara II Tingkat Nasional dalam Lomba Promosi Konseling Kepada KBPPPK Rumah Sakit

Lomba tersebut diadakan sebagai bentuk evaluasi skalingspesialis bagi Fasilitas Kesehatan yang

telah melaksanakan pelayanan promosi dan konseling kepada masyarakat dan telah mendukung program Kelurga Beencana Kesehatan Reproduksi melalui pelayanan konsultasi KBPPPK (KB Pasa Pelalihan dan Pasa Keggan) yang mendukung pencapaian Kepesahan KB Baru

- 5) Peingkat III Pra ktk Mandiri Bidan Terbaik Tahun 2018 Regional Jawa Bali



Pemilihan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB yang berkualitas oleh Praktik Mandiri Bidan. Seleksi di tingkat Provinsi Bidan Kuswatingsih, A.Md. Keb meraih nilai tertinggi dan mewakili DIY dalam penilaian di tingkat nasional. Setelah melalui verifikasi di tingkat Nasional, Bidan Kuswatingsih, A.Md. Keb memperoleh peringkat III di Regional Jawa Bali.

6) Juara Pakartri Utama III Lomba Kesatuan Gerak PKK -KKBPK-Kes



Tim Penggerak PKK DIY meraih penghargaan Juara Pakartri Utama III Lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kes yang diwakili oleh Desa

Panggunharjo, kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun yang melibatkan PKK, Dinas Kesehatan dan BKKBN sebagai mitra kerjasama dalam pelaksanaan program KKBPK antara lain pelayanan KB, Pengendalian Penduduk, Pelayanan Kesehatan, kelompok Kegiatan Tribina, Pemanfaatan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat

7) Juara III Tingkat Nasional Lomba Petugas Pelayanan KB Non PNS

Dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional Ke - XXV di Manado Sulawesi Utara, Diekspat Bina Lini Lapangan menyelenggarakan Lomba Petugas Lapangan KB Non PNS Tingkat Nasional yang berlangsung di Hotel Mercu, Manado, Tati Beach Resort Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 5 - 6 Juli 2018. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan penghargaan/reward



atas pengabdian PLKB Non PNS di bidang pembangunan KKBPK. Setelah melalui tahapan seleksi yang cukup ketat tentang pengetahuan dan ketampilan dalam melaksanakan tugas sebagai PKB dan bersaing dengan

peserta dari 33 Provinsi lainnya, perwakilan dari DIY yaitu Ikhtiarisca Olifia M, Petugas Pn KB Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Berhasil keluar sebagai Juara.III

8) Juara III Tingkat Nasional Lomba Fotografi

Dalam rangkaian kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Petugas Media Production Centre (MPC) dan Mobil Unit Peneangan (MUPEN) di Bogor tanggal 26 -29 Maret 2018, Tim dari Subbid Advokasi KIE



Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara 3 Lomba Fotografi Tingkat Nasional. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi petugas pengelola Advokasi dan KIE sehingga diharapkan lebih tampil dalam hal Fotografi. Dalam pelaksanaan seleksi lomba, masing-masing tim provinsi mengirimkan hasil Fotografi selama kegiatan berlangsung dan dipilih 3 terbaik.

9) Juara Harapan II Tingkat Nasional Lomba Karya Tulis Kependidikan Tahun 2018



Salah satu dari para yang dapat dilakukan untuk menanamkan konsep pembangunan berbasis kependidikan pada generasi muda adalah melalui pelaksanaan lomba Karya Tulis Kependidikan. Melalui lomba ini diharapkan Generasi muda (remaja) memiliki pengertian dan kesadaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat serta dampaknya terhadap pembangunan sumberdaya manusia berkualitas serta mampu menjelaskan dan mengajak masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan, melalui kepedulian terhadap masalah kependidikan. Dalam perlombaan ini Perwakilan BKKBN DIY yang diwakili oleh Risky Dwicahyani dengan judul karya tulis 'Memanfaatkan Bonus Demografi (Sebuah Pembelajaran Dari Google Kid)' mampu meraih Juara Harapan II Tingkat Nasional.



Bab IV

Penutup

Pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018, menyajikan informasi realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat mencapai keberhasilan pencapaian program yang lebih tinggi dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis Renstra BKKBN periode tahun 2018.

A. ~~5~~n

1. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 yang masuk dalam kategori BAIK SEKALI ~~1~~BIRU~~1~~ dengan rentang pencapaian antara 101,44% s.d. 400% adalah :
 - a. Meningkat~~n~~ pengetahuan keluarga tentang kependudukan
 - b. Terbentuk~~n~~ Kampung KB
 - c. Meningkat~~n~~ median usia kawin pertama
 - d. Meningkat~~n~~ pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan

- e. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - f. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)
 - g. Terbentuknya Kampung KB
 - h. Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak
 - i. Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran
 - j. Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB
2. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 201 yang masuk dalam kategori BAIK HIJAU dengan rentang pencapaian antara 90,73% s.d. 99,59% adalah :
- a. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
 - b. Meningkatnya pencapaian kinerja
 - c. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
 - d. Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)
 - e. Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya .
3. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 yang masuk dalam kategori CUKUP KUNING dengan rentang pencapaian antara 81% s.d. 86,40% adalah :
- a. Meningkatnya penyerapan anggaran
 - b. Meningkatnya pencapaian output
 - c. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi

4. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 yang masuk dalam kategori KURANG MERAH dengan rentang pencapaian antara 0% s.d. 66,28% adalah :
 - a. Menurunkan kehamilan tidak diinginkan dari PUS (15 -49 tahun)
 - b. Meningkatkan peserta KB Aktif
 - c. Meningkatkan pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi

B. Langkah-Langkah ke Depan

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan intensifikasi kegiatan KIE, Konseling dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran ; dengan menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KBPK, terutama untuk menurunkan Kehamilan yang Tidak diinginkan (KTD) dan mengutamakan sasaran khusus PUS yang pengetahuannya untuk semua jenis kontrasepsi masih terbatas, untuk tidak drop uot penggunaan kontrasepsi yang selanjutnya dapat meningkatkan peserta KB aktif.
2. Melakukan Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Mengimplementasi SPIP di Perwakilan BK KBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien serta memperkuat peran pengelasan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan sebagai konsultan dalam rangka pencegahan terjadinya kesalahan/penyimpangan;

4. Memantapkan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi guna mempertahankan prestasi yang selama ini diraih, sehingga dapat saling berpengaruh secara positif.
5. Perlu dilakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan target agar indikator yang dari pusat tidak pas, sehingga target dapat mencerminkan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta
6. LKIP merupakan acuan yang tepat dalam perencanaan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang, sesuai dengan indikator utama(IKU). .



LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. RENSTRA PERWAKILAN BKKBN DIY TAHUN 2015-2019
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / PERKA NO 4 TAHUN 2018
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
4. DEFINISI OPERASIONAL PK TAHUN 2018
5. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2018



RENCANA STRATEGIS

PERWAKILAN BKKBN DIY TAHUN 2015 - 2019



Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2015 – 2019 telah selesai disusun tepat waktu. Rencana Strategi tersebut merupakan jabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang memuat visi dan misi pemerintah 5 tahun ke depan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Penyusunan renstra ini mengacu kepada ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan Balance Score Card (BSC). RENSTRA Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2015 - 2019 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya akan menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja BKKBN dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN di dalam menyelenggarakan Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Demikian RENSTRA ini dapat tersusun berkat kerja sama dari semua tim penyusun, semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Desember 2018
Kepala,

Drs. Bambang Marsudi, MM

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2015-2019

2.1 TUJUAN PERWAKILAN BKKBN DIY

Dalam rangka mendukung upaya BKKBN dalam mewujudkan 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawa Cita) Kabinet Pemerintahan Gotong-royong, terutama pada Agenda ke 5 (lima) yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka Perwakilan BKKBN DIY menetapkan tujuan utama pembangunan KKBPK tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR dimaksud diupayakan dapat dicapai melalui: (a) penetapan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistic alokon); (b) Pengembangan operasional pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; (c) peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB serta penyediaan distribusi sarana dan prasarana; (d) penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB; (e) meningkatkan jejaring pelayanan KB (bidan praktek swasta, dokter praktek swasta, puskesmas pembantu, poliklinik desa, pos kesehatan desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR.
2. Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksinya (rasional, efektif dan efisien) dan meningkatkan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi;
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga melalui pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu antar sector dan Kab/Kota.

2.2 SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BKKBN DIY

Untuk mencapai tujuan utama di atas Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut:

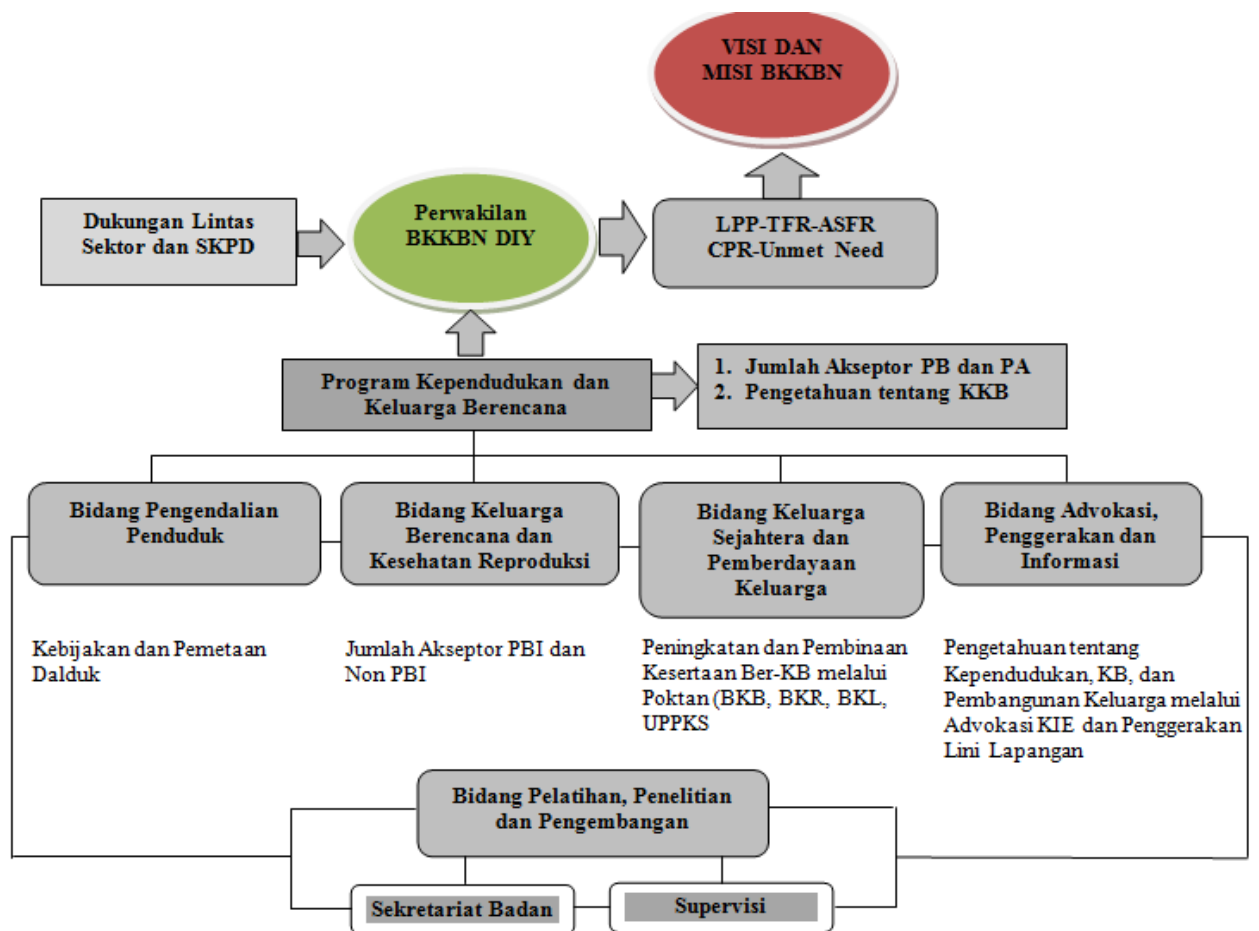
1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
4. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA PERWAKILAN BKKBN DIY

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 maka Perwakilan BKKBN DIY menyusun dan menetapkan Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Gambar 4.1
Skema Struktur Program dan Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY
Tahun 2014-2015



Skema di atas merupakan skema struktur Program dan Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2015-2019. Dalam skema tersebut digambarkan bahwa untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi BKKBN, Perwakilan BKKBN DIY menetapkan Sasaran Strategis (LPP, TFR, ASFR, CPR dan Unmetneed) dan mewujudkan sasaran tersebut dengan menyelenggarakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang memiliki indikator pencapaian sasaran program. Penyelenggaraan program KKBPK juga didukung oleh Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, serta Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas aparat Perwakilan BKKBN DIY.

4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN DIY

Sasaran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai cerminan atas keberhasilan pencapaian outcome melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagai penjabaran tujuan strategis, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
4. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan juga indikator tahunan dari Rencana Strategis Perwakilan BKKBN DIY 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN DIY
Tahun 2015-2019

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,10 (SDKI 2012)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	59,60 (SDKI 2012)	62,28	62,48	62,69	62,89	63,10	63,10
3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,50 (SDKI 2012)	10,69	10,57	10,35	10,23	10,00	10,00

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
4	Persentase Peserta KB Aktif MKJP 36,21 (SDKI 2012)	40,56	41,93	42,94	44,12	46,50	46,50
5	Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi 27,00 (SDKI 2012)	25,90	25,61	25,21	24,91	24,51	24,51

4.1.2 Sasaran Kegiatan (*Output*) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran kegiatan (*output*) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN DIY tahun 2015-2019. Sasaran dimaksud terdiri atas 1 (satu) Program teknis dan 3 (tiga) Program Generik sebagai berikut:

1. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
2. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;serta
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perwakilan BKKBN DIY.

4.1.2.1 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah terlaksananya Program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
2. Cakupan Pembinaan Kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah.
3. Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah.
4. Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan.
5. Persentase petugas lini lapangan (PKB/PLKB) yang mendapat Dukungan Operasional Program KKBPK.
6. Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembanguann KKB di seluruh tingkatan wilayah.
7. Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provinsi.

4.1.2.2 Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Perwakilan BKKBN DIY adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program serta Penelitian dan Pengembangan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan



**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu adanya penetapan peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Utama BKKBN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.31	2.28
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	61.1	61.3
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10.14	9.91
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4	Persentase peserta KB Aktif MKJP	22.30	23.50
5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	25	24.6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		2	Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK	4 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5
		3	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	100%	100%
18	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	34 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
		2	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	85% Kab/Kota	100% Kab/Kota
		3	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	34 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
		4	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	85% Kab/Kota	100% Kab/Kota
		5	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	110 Kab/Kota	110 Kab/Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		6	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	34	34
		7	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	34	34
		8	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
		9	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	Additional Users (PA tambahan): 965.000	Additional Users (PA tambahan): 744.000
		10	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/ kab	3 frek/th/ kab
		11	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	71,1	85
		12	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	66%	85%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
		13 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	100% Kab/Kota	100% Kab/Kota
		14 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	33 Prov dan 547 Kab/Kota	33 Prov dan 547 Kab/Kota
		15 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	34 Prov dan 514 Kab/Kota	34 Prov dan 514 Kab/Kota
		16 Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100%	100%
		17 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100%	100%
		18 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100%	100%
		19 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100%	100%
		20 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	100%	100%
		21 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang	70%	80%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
		mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK		
		22 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	34	34
		23 Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional		
		24 Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat Dukungan Operasional program KKBPK	100	100
		25 Jumlah Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja di setiap tingkatan wilayah	34	34
		26 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	34	34
		27 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	34 prov dan 547 kab/kota	34 prov dan 547 kab/kota
		28 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100%	100%
		29 Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		30	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	34	34
19	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK	1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota	1	1
		2	Jumlah regulasi/kebijakan program KKBPK	10	5
		3	Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum, Organisasi dan Humas	34	34
20	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP	1	Persentase Laporan Keuangan & BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan	100%	100%
		2	Jumlah satker yang melaksanakan tata kelola keuangan dan BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan peraturan perundang undangan	42	42
		3	Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	100 %	100 %
		4	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundangan	100%	100%
		5	Persentase Barang Inventaris Tercatat pada SIMAK BMN di semua tingkatan yang kredibel	100%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
	kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	2	Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumah tanggaan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		3	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		4	Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		5	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Keprotokolan dan Keamanan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		6	Indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran, keprotokolan dan keamanan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		7	Jumlah fasilitasi, pembinaan dan evaluasi	12	12
		24	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)
2	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)			100	100
3	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran			12	12
4	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)			12	12
25	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I	1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I	14 Satker	14 Satker
		2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan I	50%	45%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	90%	95%
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	90%	95%
		5	Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPk di wilayah III	14 dok	14 dok
28	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	34	34
		2	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	34	34
29	Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB	1	Persentase SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program Meningkatkan Kualitasnya	75%	80%
		2	Persentase SDM Tenaga Pegawai dan Tenaga Program yang mengikuti pelatihan	75%	80%
			Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang terfasilitasi untuk akreditasi	1	1
30	Meningkatkan SDM Aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional	1	Jumlah SDM Aparatur yang Meningkatkan Kualitasnya Melalui Program Pendidikan ke Luar Negeri	40	40
		2	Jumlah SDM Aparatur dan Mitra Kerja yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri	55	61

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		3	Jumlah Kerjasama Internasional yang dapat Diimplementasikan	6	6
31	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS	1	Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	17	18
		2	Tingkat kepuasan pengguna (user) terhadap hasil penelitian KB dan KS	3,2 (skala 1-4)	3,3 (skala 1-4)
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan KB dan KS	34	34
32	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	1	Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	16	17
		2	Tingkat Kepuasan Pengguna (user) terhadap Hasil Penelitian (Indeks)	3,3 (skala 1-4)	3,5 (skala 1-4)
33	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh
		2	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	14996	15995
		3	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
		4 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3	3

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO



PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
A SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.05
2	Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	54.16
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25.00
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.70
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	41.77
6	Meningkatnya peserta KB Aktif	6	Jumlah peserta KB Aktif tambahan	9,119
B SASARAN PROGRAM				
7	Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	7	Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	16
8	Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	8	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	8.10
9	Meningkatnya median usia kawin pertama	9	Median usia kawin pertama wanita	23.5
10	Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang kependudukan	10	Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan	52.60
11	Meningkatnya pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi	11	Persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	51.90
12	Meningkatnya pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	12	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	20.00
C INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
13	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	13	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	66.9
14	Terbentuknya Kampung KB	14	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	73
15	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	15	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	25.00
16	Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak	16	Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan	13.31
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	17	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 (Skor: 2,7)
18	Meningkatnya pencapaian kinerja	18	Persentase capaian kinerja	≥ 90
19	Meningkatnya pencapaian output	19	Persentase pencapaian output	≥ 95
20	Meningkatnya penyerapan anggaran	20	Persentase penyerapan anggaran	≥ 95
21	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	21	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100.00

KEGIATAN	ANGGARAN
- Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 86,933,790,000

**Pjt. Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,**

Sigit Priohutomo

**Jakarta, Januari 2018
Kepala Perwakilan BKKBN
Daerah Istimewa Yogyakarta,**

Bambang Marsudi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Marsudi

Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sigit Prihutomo

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sigit Prihutomo

Jakarta, Januari 2018
Pihak Pertama,



Bambang Marsudi

DEFINISI OPERASIONAL KKP TAHUN 2018

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KKP PROVINSI 2018

NO	INDIKATOR KKP 2018	DEFINISI DAN FORMULASI INDIKATOR KKP PROVINSI
A. SASARAN STRATEGIS		
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata – rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan 15-49 tahun pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung Jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika dapat melampaui masa melahirkan anak dengan mengikuti pola ASFR saat ini (SDKI 2007, pp.49) <p>Formula: Banyaknya kelahiran dari perempuan usia 15-49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan usia 15-49 tahun pada periode yang sama.</p> $TFR = \sum \frac{K_i}{P_i} \times 5$ <p>i : Kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49; K_i : jumlah kelahiran pada kelompok umur tertentu; P_i : jumlah perempuan pada kelompok usia ke-i .</p>
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	<p>Definisi: Persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern pada saat pengamatan</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum PA \text{ modern}}{\sum PUS} \times 100\%$ <p>Keterangan PA = Peserta KB Aktif PUS = Pasangan Usia Subur 15 – 49 tahun</p>
3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase PUS yang mengalami putus pakai kontrasepsi pada bulan berjalan dibandingkan dengan jumlah PUS yang ada pada bulan berjalan (Statistik Rutin) Proporsi pemakai alat/cara KB yang berhenti memakai alat/cara tersebut dalam waktu satu tahun setelah mulai menggunakan alat/cara KB (SDKI 2007, pp. 107) <p>Formula Statistik Rutin:</p> $\frac{PA_{(i-1)} + PB_i}{PA_{(i-1)}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PA = Peserta KB Aktif PB = Peserta KB Baru i = bulan/tahun ke-i</p> <div style="background-color: #D9E1F2; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Formula SDKI: Jumlah lama pemakaian peserta KB pada setiap alat/cara KB dan menurut alasan berhenti kemudian dibagi dengan jumlah seluruh bulan pemakaian (SDKI 2007, pp. 107)</p> </div>

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KKP PROVINSI 2018

NO	INDIKATOR KKP 2018	DEFINISI DAN FORMULASI INDIKATOR KKP PROVINSI
A. SASARAN STRATEGIS		
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan) SDKI 2007, pp.98) <p>Formulasi Statistik Rutin:</p> $\frac{\text{PUS Bukan Peserta KB}}{(\text{IAT} + \text{TIAL})} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">Total PUS</p> <p>Formulasi SDKI :</p> $U = U_L + U_S$ <p>U = Total Unmet Need U_L = Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) U_S = Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan berhenti sama sekali (pembatasan)</p> <p>Keterangan IAT : Ingin Anak Ditunda (Penjarangan) TIAL: Tidak Ingin Anak Lagi (Pembatasan) Total PUS : Jumlah Seluruh PUS</p>
5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	<p>Definisi:</p> <p>Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern) adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) Total seluruh Peserta KB Aktif pada periode yang sama dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Formulasi:</p> <p>Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah Total seluruh Peserta KB Aktif pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase.</p> $\frac{\sum \text{PA MKJP}}{\sum \text{PA}} \times 100\%$
6	Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan (Additional User)	<p>Definisi:</p> <p>Jumlah tambahan wanita (atau pasangan mereka) dalam usia subur yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern dibandingkan periode tahun sebelumnya</p> <p>Formulasi PA Tambahan Tahunan/Bulanan:</p> <p>PA Tambahan Bulanan = $PA_i - PA_{(i-1)}$</p> <p>PA Tambahan Tahunan = $PA_k - PA_{(k-1)}$</p> <p>Keterangan PA = Peserta Aktif i = bulan ke-i ; k = tahun ke-k</p>

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KKP PROVINSI 2018

NO	INDIKATOR KKP 2018	DEFINISI DAN FORMULASI INDIKATOR KKP PROVINSI
B.	SASARAN PROGRAM	
7	Angka kelahiran remaja 15-19 tahun (ASFR 15-19)	<p>Definisi: Banyaknya kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun pada periode tertentu dibagi jumlah penduduk perempuan usia 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1000 perempuan usia 15-19 tahun.</p> <p>Formula: Jumlah kelahiran pada wanita usia 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan usia 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1000</p> $ASFR_{15-19} = \frac{B_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$ <p>Keterangan B_{15-19} : Jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia 15-19 P_{15-19} : Jumlah wanita kelompok usia 15-19</p>
8	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS 15-49 tahun	<p>Definisi: Persentase dari wanita usia 15-49 tahun dan pasangannya yang tidak menginginkan tambahan anak atau ingin menunda kehamilannya dalam waktu tertentu, biasanya diukur dari kehamilan terakhir dan saat ini.</p> <p>Formula: Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan oleh PUS 15-49 tahun dibandingkan dengan jumlah PUS yang disurvei</p> $\frac{\text{Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan oleh PUS 15-49 tahun}}{\text{Jumlah kehamilan PUS 15-49 tahun}} \times 100\%$
9	Median Usia Kawin Pertama Wanita	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan • Umur dimana 50 persen dari semua wanita dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan (SDKI 2012, pp 46) <p>Formula: Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun pada periode tertentu.</p>

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KKP PROVINSI 2018

NO	INDIKATOR KKP 2018	DEFINISI DAN FORMULASI INDIKATOR KKP PROVINSI
B. SASARAN PROGRAM		
10	Meningkatkan pengetahuan tentang kependudukan (isu kependudukan), KB (pengetahuan ttg metoda alat kontrasepsi) dan pembangunan keluarga	
a.	Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan	<p>Definisi: Jumlah keluarga yang diwakili oleh responden yang mampu menjawab dengan benar tentang isu kependudukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.</p> <p>Formula: Jumlah keluarga yang mampu menjawab tentang isu kependudukan dibandingkan dengan jumlah seluruh keluarga yang disurvei.</p> $\frac{\text{Jumlah PUS yang mampu menjawab dengan benar tentang isu kependudukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan}}{\text{Jumlah PUS yang terlibat dalam survey}} \times 100\%$
b.	Persentase pengetahuan PUS tentang metoda alat kontrasepsi	<p>Definisi: Persentase pengetahuan PUS terhadap metode alat kontrasepsi yang terdiri dari pil, kondom, suntik, IUD, Implant, MOW dan MOP</p> <p>Formula: Jumlah PUS yang mampu mengetahui semua alat kontrasepsi (AND bukan OR), dibandingkan dengan PUS yang disurvei</p> $\frac{\text{Jumlah PUS yang mengetahui tujuh alat kontrasepsi}}{\text{Jumlah PUS yang terlibat dalam survey}} \times 100\%$
11	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	<p>Definisi: Jumlah kabupaten/kota yang telah memanfaatkan analisis dampak kependudukan untuk mendukung dalam penyusunan kebijakan berwawasan kependudukan</p> <p>Formula: Banyaknya kabupaten/kota yang telah memanfaatkan analisis dampak kependudukan untuk memasukan kebijakan berwawasan kependudukan dibandingkan banyaknya kabupaten/kota yang ada</p>
12	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	<p>Definisi: Indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja mengenai masa subur, umur menikah dan melahirkan, anemia dan HIV/AIDS, serta pengetahuan tentang narkoba.</p> <p>Formula: Indeks komposit pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja yang tersusun atas 4 aspek, yaitu indeks pengetahuan masa subur, indeks pengetahuan umur menikah dan umur melahirkan, Indeks pengetahuan anemia dan HIV/AIDS serta Indeks pengetahuan tentang narkoba.</p>
13	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	<p>Definisi: Jumlah Kampung KB yang dicanangkan pada tahun 2018 berdasarkan 50% dari jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal tahun 2015 berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p>Formula: Banyaknya Kampung KB yang dicanangkan pada 50% dari jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal</p>

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KKP PROVINSI 2018

NO	INDIKATOR KKP 2018	DEFINISI DAN FORMULASI INDIKATOR KKP PROVINSI
B. SASARAN PROGRAM		
14	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB	<p>Definisi: Jumlah Kampung KB yang telah dicanangkan dan telah memiliki Kelompok Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Kampung KB.</p> <p>Formula: Banyaknya Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja Kampung KB dibandingkan banyaknya Kampung KB yang ada</p>
15	Persentase Orangtua Hebat yang memiliki baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan	<p>Definisi: Jumlah keluarga yang memiliki Baduta (bayi usia 0-2 tahun) yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)</p> <p>Formula: Banyaknya keluarga yang memiliki Baduta) yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dibandingkan dengan seluruh keluarga yang memiliki Baduta</p>
16	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<p>Definisi: Penilaian tingkat ukuran kualitas atau maturitas implementasi SPIP pada masing-masing unit kerja eselon II pusat dan provinsi di lingkungan BKKBN berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016</p> <p>Formula: Tingkat level ukuran kualitas atau maturitas implementasi SPIP di setiap unit kerja eselon II pusat dan provinsi di lingkungan BKKBN dengan nilai level berada pada interval skala 1-5</p>
17	Persentase pencapaian kinerja	<p>Definisi: Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan.</p> <p>Formula: Mengikuti hasil penilaian dari Aplikasi SMART</p>
18	Persentase pencapaian output.	<p>Definisi: Persentase pencapaian sesuai dengan output yang diharapkan.</p> <p>Formula: Mengikuti hasil penilaian dari Aplikasi SMART</p>
19	Persentase Penyerapan anggaran	<p>Definisi: Persentase anggaran yang mampu diserap pada tahun berjalan.</p> <p>Formula: Mengikuti hasil penilaian dari Aplikasi SMART</p>
20	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	<p>Definisi: BMN yang tercatat dalam SIMAK BMN dan ditetapkan status penggunaannya oleh penggunaannya ditetapkan oleh Kepala BKKBN atau Menteri Keuangan disesuaikan dengan nilai barangnya</p> <p>Formula: Mengikuti hasil penilaian dari Aplikasi SIMAK BMN.</p>

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Triwulanan				Kegiatan/Aktivitas yang Diperlukan Untuk Mencapai Target	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET	
				Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4				
											1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	2	3	4	5				6	7	8	9												10	
3	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,00	-	-	-	25,00	Pertemuan Penguatan Kemitraan dalam Peningkatan Pelayanan KB	43.200.000	Kabid KB-KR				v										
								Sosialisasi Pedoman Standarisasi Pelayanan KB Nasional	7.650.000	Kabid KB-KR				v										
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) PUS : 655.133	7,70	12.611	12.611	12.611	12.611																	
5	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	41,77	37.052	37.052	37.052	37.052																	
6	Meningkatnya peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan	9.119	2.280	2.280	2.280	2.279																	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Triwulanan				Kegiatan/Aktivitas yang Diperlukan Untuk Mencapai Target	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET			
				Triwulan							Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4						
				1	2	3	4				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
1	2	3	4	5				6	7	8	9												10			
12	Meningkatnya pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	20,00				20																			
C													INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA													
13	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	66,90				66,90																			
14	Terbentuknya Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	73,00				73																			
15	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	25,00				25,00																			
16	Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak	Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan	13,31				13,31																			
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 (Skor : 2,7)				2 (Skor : 2,7)																			
18	Meningkatnya pencapaian kinerja	Persentase capaian kinerja	≥ 90				≥ 90																			
19	Meningkatnya pencapaian output	Persentase pencapaian output	≥ 95				≥ 95																			
20	Meningkatnya penyerapan anggaran	Persentase penyerapan anggaran	≥ 95				≥ 95																			
21	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	Persentase barang inventaris yang tercatat pada SIMAK BMN	100				100																			
								TOTAL ANGGARAN	487.805.000																	

Yogyakarta, 19 Maret 2018
Republik Perwakilan BKKBN DIY



Dr. Bambang Marsudi, MM
NIP. 19590202 198603 1 002

LAMPIRAN
MONEV PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Notulen kegiatan
Rapat Pengendalian Program dan Anggaran

Hari, tanggal : Rabu, 28 November 2018

Tempat : Ruang Kencana, Perwakilan BKKBN DIY

Peserta : - SKPD KB Kab Kota

- Satgas PKB DIY

- Pejabat struktural dan fungsional di Perwakilan BKKBN DIY

Arahan Kepala Perwakilan BKKBN DIY

- Capaian PB masih rendah, raport merah
- 1 bulan kemungkinan untuk pencapaian PB sesuai KKP berat
- Tanggung jawab KKP yang harus menjadi komitmen kita bekerja
- Potret capaian sampai bulan Oktober nanti akan disampaikan, termasuk realisasi anggaran
- Pemakaian kontrasepsi tradisional hampir 9% → menjadi sasaran kita
- Masukan dari bapak ibu

Kabid ADPIN

- Pencapaian masih merah
- Dibandingkan dengan pencapaian absolut tahun 2017 dan 2016 pada bulan oktober, memang tahun ini mengalami penurunan
- Pada pertemuan di hotel sahid kemarin, kita sudah mengumpulkan faskes untuk pencatatan dan pelaporan
- Permasalahan dengan JKN sangat beragam, berbeda antar wilayah penanganannya
- Difasilitasi untuk pengguna alkon suntik supaya ketika ada survey bisa menaikkan CPR modern
- Hasil SDKI 2017, cara tradisional mengalami kenaikan
- Kampung KB ada laporan online, mohon untuk dapat mengisi online

Kasubbag. Keuangan dan BMN

- Realisasi anggaran sampai bulan November 2018
- Persediaan alkon di gudang provinsi

Kepala Perwakilan BKKBN DIY :

- 50 sampai 60 ribuan, PB kita mencapai 100 persen tetapi ini sudah diturunkan tetapi tetap tidak tercapai, ini bukan masalah diatas, ada permasalahan dengan penerimaan program-program KB di masyarakat
- Kalau dari sisi kebijakan tidak terlalu berpengaruh, menurut saya, bukan karena itu
- Apakah sudah meluntur melembagakan program KB, untuk generasi muda iya, namun untuk generasi tua masih ada
- Kebijakan pemerintah tidak dirundingkan secara matang, seperti kode etik, bidan tidak boleh melayani, hal-hal tersebut sudah kita bahas di pusat, untuk kebijakan tidak terlalu kita risaukan
- Model ADV dan KIE seperti apa yang bisa menggugah masyarakat
- Berbagai cara untuk melihat apakah laporan pelayanan kontrasepsi yang cukup tinggi
- Apa optimalisasi laporan dan cakupan laporan

Kabid ADPIN :

- PB banyak, namun tidak mendapatkan alkon dari BKKBN sehingga tidak dilaporkan
- Seberapa besar berpengaruh BPJS terhadap capaian PB, terhadap coverage laporan PB kita, mungkin faktanya di DIY semakin menurun, perlu ada penelitian lebih lanjut, ada persoalan apa
- Mungkin strateginya diubah, PKB datang dan mencatat ke faskes yang tidak lapor
- PKB merubah strategi KIE nya kepada generasi muda, kecenderungan mereka mengikuti tren dari selebritis yang cenderung mempunyai anak yang banyak
- Targetnya pada pumupar, karena dampaknya akan lebih berarti. Bantul TFR nya tertinggi se DIY, secara operasional menjadi penting untuk digali, mengapa terjadi
- PKH bagi kita di provinsi tidak terasa, namun di lapangan benturannya sangat terasa

Pak Nurhadi, PKB Kecamatan Sentolo :

- Besuk ada FGD, akan disampaikan lagi
- Dalil agama tertentu, terkait dengan MOP

Kepala Perwakilan BKKBN DIY : PKH embrionya dari BKKBN juga, tapi sampai dinsos lepas

**NOTULEN RAPAT KOORDINASI DAERAH
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

I. PELAKSANAAN

Hari/tanggal	: Rabu, 14 Maret 2018
Tempat	: Ruang Borobudur, Hotel Garuda DIY
Peserta	: Ketua Forkom Pemda, Yogyakarta, Kepala OPD-KB Kabupaten/kota, instansi lintas sektor, Penyuluh KB/PLKB, mitra kerja, pejabat struktural dan fungsional BKKBN DIY.
Narasumber	: 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda DIY 2. Kepala Bappeda DIY 3. Kepala Dinas Kesehatan DIY 4. Kepala BPPM DIY
Moderator	: Drs. Bayu Haryana, M.Si. (Staf Ahli Gubernur)

II. HASIL

1. Yang diperlukan dalam menggarap Kampung KB dan dan Program KKBPK adalah bagaimana lintas sektoral dapat terlibat dan perlunya merasa memiliki.
2. Dalam menggarap Kampung KB dan Program KKBPK perlu dilakukan peningkatan SDM dan kelembagaan dari tingkat bawah sampai atas, SOP serta sarana dan prasarana.
3. Perlu tindak lanjut agar dalam penggarapan Kampung KB dan Program KKBPK lebih konkrit

III. Arahan dari Sekretaris Daerah DIY

1. Tindak lanjut dari rumusan pada pertemuan ini perlu segera dilaksanakan.
2. Payung hukum lintas sektoral untuk penggarapan kampung KB sangat diperlukan, dalam Inpres yang akan turun segera, aka nada 19 sektor yang akan terlibat dalam penggarapan kampung KB.
3. Agenda penggarapan Kampung KB merupakan jabaran dari nawacita pada poin ke-3,5 dan 8.

Tim Notulis,
Anggraeni Wulandari, S.Sos, MA
Riza Fatma Arifa, S.Si, M.Si
Dra. Wiwik Sri Windarti, SE



RUMUSAN HASIL
TELAAH PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
(KKBPK) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

6 September 2018

Dengan mempertimbangkan;

- Arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diwakili oleh Wakil Gubernur;
- Evaluasi Pencapaian Program KKBPK Semester 1 Tahun 2018 yang disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN DIY;
- Penyajian Materi oleh 3 (tiga) Kepala Bidang Operasional Perwakilan BKKBN DIY;
- Paparan Pengelolaan & Pengembangan Kampung KB RW 12 Kel. Prawirodirjan Kota Yogyakarta;
- Serta diskusi yang berkembang;

Dapat dirumuskan bahwa secara umum pemakaian kontrasepsi modern/ CPR di DIY mengalami sedikit penurunan dari 59,6 % (SDKI 2012) menjadi 57,8 % (SDKI 2017). Seiring dengan menurunnya pemakaian kontrasepsi, angka kelahiran total di DIY ada sedikit peningkatan, yaitu; dari 1,8 (SDKI 2007) menjadi 2,1 (SDKI 2012) dan meningkat menjadi 2,2 (SDKI 2017) .

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyikapi turunnya CPR modern di DIY perlu adanya upaya dalam meningkatkan capaian Program KKBPK di Semester 2 Tahun 2018.

Adapun secara ringkas, Rumusan Telaah Pelaksanaan Program KKBPK Semester 1 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Perlu adanya prioritas pelayanan kontrasepsi modern kepada PUS Paritas rendah melalui pembinaan kelompok kegiatan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesertaan berKB dengan melibatkan mitra kerja dan lintas sektor .
2. Peningkatan kesertaan KB Baru, KB Aktif dan penurunan Unmet Need melalui akses pelayanan KB-KR yang merata dan berkualitas dengan strategi Pelayanan KB, distribusi Alat Kontrasepsi, Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan terlatih, kualitas promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi, pembiayaan dan sistem rujukan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang koordinasinya perlu ditingkatkan intensitasnya dengan stakeholder terkait.
3. Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga yang berkesinambungan terhadap kelompok kegiatan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan.
4. Perlu peningkatan komitmen dan peran pemangku kebijakan dan mitra kerja lintas sektor terkait dengan diimbangi intensifikasi penggarapan di Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam mendukung Program KKBPK serta pembangunan sektor lainnya untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

5. Peningkatan Peran Rumah Data Kependudukan sebagai media untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data informasi yang update dalam mendorong kebijakan kependudukan melalui Program KKBPK, agar lebih berkualitas dan tepat sasaran.
6. Dalam meningkatkan Pencapaian Peserta KB Baru perlu adanya media KIE untuk menjaring calon akseptor dan menjalin kerjasama dengan mitra kerja yang mempunyai komitmen tinggi terhadap Program KKBPK.

Demikian rumusan Telaah Pelaksanaan Program KKBPK Semester 1 Tahun 2018, dengan harapan dapat menjadi pelaksanaan Program KKBPK semester 2 Tahun 2018 dengan menjunjung tinggi Nilai Integritas , Etos Kerja dan Penuh Semangat Gotong Royong.

Yogyakarta, 6 September 2018

Tim Perumus,

1. dr. lin Nadzifah Hamid
2. Ir. Sri Sugiharti, M. Kes
3. dr. M.Z. Fathurachman, M.Sc
4. Anita Ekawati,S.Sos
5. A. Utomo Budi Santoso, S.Pd.





KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 109 / KEP / B3 / 2018

T E N T A N G

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650 PO.BOX : 296 JKT 13013
Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 Fax. : (021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BKKBN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 109 / KEP/B3/2018

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan		Nilai Buku		Kondisi
						Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(9)
1	3050104005	Filling Cabinet	74	1 buah	2018	2,399,000	2,399,000	2,399,000	2,399,000	Baik
2	3050105048	LCD Projector/Infocus	10	1 buah	2018	7,900,000	7,900,000	7,110,000	7,110,000	Baik
3	3050105048	LCD Projector/Infocus	11	1 buah	2018	8,300,000	8,300,000	7,470,000	7,470,000	Baik
4	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	120-121	2 buah	2018	2,399,000	4,798,000	2,399,000	4,798,000	Baik
5	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	90-119	30 buah	2018	612,000	18,360,000	612,000	18,360,000	Baik
6	3050201003	Kursi Besi/Metal	488-517	30 buah	2018	442,800	13,284,000	442,800	13,284,000	Baik
7	3060101036	Microphone/Wireless MIC	10	1 buah	2018	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Baik
8	3060101036	Microphone/Wireless MIC	11	1 buah	2018	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Baik
9	3100102001	P.C. Unit	65-66	2 buah	2018	4,700,000	9,400,000	4,112,500	8,225,000	Baik
10	3100102001	P.C. Unit	67	1 buah	2018	11,475,000	11,475,000	10,040,625	10,040,625	Baik
70 buah							Rp 80,916,000		Rp 76,686,625	

a.n Kepala Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional

SEKRETARIS UTAMA,



H. NOFRIJAL, SP, MA
NIP. 19601111 198503 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BKKBN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : / KEP/B3/2018

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan		Nilai Buku		Kondisi
						Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(9)
1	3100102001	P.C. Unit	68-70	3 buah	2018	7,900,000	23,700,000	7,900,000	23,700,000	Baik
2	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	81-82	2 buah	2018	2,300,000	4,600,000	2,300,000	4,600,000	Baik
3	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	83	1 buah	2018	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Baik
4	3050105048	LCD Projector/Infocus	12	1 buah	2018	24,894,240	24,894,240	24,894,240	24,894,240	Baik
5	3050201001	Camera Digital	16	1 buah	2018	13,650,000	13,650,000	13,650,000	13,650,000	Baik
6	3060347002	Genset	1-3	3 buah	2018	16,898,827	50,696,481	16,898,827	50,696,481	Baik
7	3060347002	Genset	4	1 buah	2018	10,968,227	10,968,227	10,968,227	10,968,227	Baik
12 buah							Rp 131,308,948		Rp 131,308,948	

a.n Kepala Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional

SEKRETARIS UTAMA,



H. NOFRIJAL, SP, MA

NIP. 19601111 198503 1 001

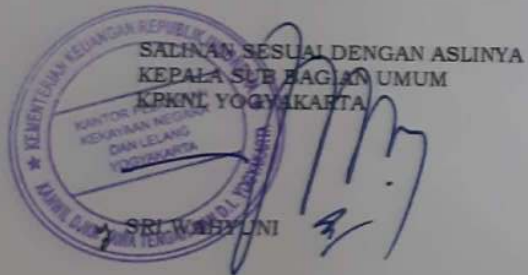


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168/KM.6/WKN.09/KNL.06/2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	DOKUMEN KEPEMILIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3.02.01.01.003	16	Station Wagon	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T	2018	209.114.000,00	BPKB Nomor O-07841326
2	3.02.01.02.003	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA KIJANG INNOVA G	2013	248.980.000,00	BPKB Nomor K-06261405
Jumlah						458.094.000,00	



a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KPKNL YOGYAKARTA,

ttd.

AGUNG BUDI SETIJADJI



KEPUTUSAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 40/KEP/C/2018
TENTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA PERCONTOHAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka ditetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Kerja Percontohan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Internal (TP) dan Tim Penilai Nasional (TPN);

5. Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBDM kepada Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2018

PLT. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO

Lampiran
Keputusan Plt. Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor : 40/KEP/C/2018
Tanggal : 17 April 2018

**SATUAN KERJA/UNIT KERJA PERCONTOHAN YANG MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH SEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

1. Satuan Kerja/Unit Kerja Inspektorat Utama.
2. Satuan Kerja/Unit Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
3. Satuan Kerja/Unit Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung.
4. Satuan Kerja/Unit Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan Kenari No. 58 (Timoho) Yogyakarta 55165

Telp. (0274) 561215, 513422

Fax. (0274) 549225 - 562936

website : yogya.bkkbn.go.id

email : yogya.bkkbn.go.id

 @bkkbndiy

 BKKBN_DIY

 perwakilan BKKBN DIY

 perwakilan BKKBN DIY